

**ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP USAHA RUMPUT LAUT DI KECAMATAN SUPPA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PINRANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
PENANAMAN MODAL DAERAH**



**Oleh:
RAMLAH RAHMAN
NIM: 11.2200.014**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2016

**ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP USAHA RUMPUT LAUT DI KECAMATAN SUPPA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PINRANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
PENANAMAN MODAL DAERAH**



**Oleh:
RAMLAH RAHMAN
NIM: 11.2200.014**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)
pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2016

**ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP USAHA RUMPUT LAUT DI KECAMATAN SUPPA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PINRANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
PENANAMAN MODAL DAERAH**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelara Sarjana Hukum (SH.)**

**Program Studi
Muamalah (Ekonomi Islam)**

Disusun dan diajukan oleh

**RAMLAH RAHMAN
NIM: 11.2200.014**

Kepada

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2016

iii

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Ramlah Rahman
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah
Nomer Induk Mahasiswa : 11.2200.014
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Muamalah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare No. St. 19/PP. 00. 9/289/2014

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H
NIP : 19761118 20051 1 002
Pembimbing Pendamping : Dumirah, S.E.,M.M
NIP : 19760604 200604 2 001



Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah
dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI

NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP USAHA RUMPUT LAUT DI KECAMATAN SUPPA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PINRANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
PENANAMAN MODAL DAERAH

disusun dan diajukan oleh

RAMLAH RAHMAN
NIM.11.2200.0014

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 14 Desember 2016 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H
NIP : 19761118 20051 1 002
Pembimbing Pendamping : Damirah, S.E.,M.M
NIP : 19760604 200604 2 001



Ketua STAIN Parepare
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19630427 198703 1 002



Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah

Nama Mahasiswa : Ramlah Rahman

Nomor Induk Mahasiswa : 11.2200.014

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Muamalah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Ketua STAIN Parepare No. St. 19/PP. 00. 9/289/2014

Tanggal Kelulusan : 14 Desember 2016

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H	Ketua	(.....)
Damirah, S.E.,M.M	Sekretaris	(.....)
Badruzzaman, S Ag., M.H	Anggota	(.....)
Andi Tenripadang, M.H.	Anggota	(.....)

Mengetahui:



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Syariah” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Napisa, Ayahanda Abd.Rahman, serta saudara saya tercinta dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada tepat waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H dan Ibu Damirah, S.E.,M.M. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, S.Ag.,M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M. Ag. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Islam/ Muamalah.
4. Bapak dan Ibu dosen seluruh program studi yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di STAIN Parepare.
5. Para sahabat seperjuangan yang meluangkan waktu menemani dan membantu penulis dalam mencari referensi.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat selesai. Semoga Allah swt, Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal baik dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 06 Maret 2016

Penulis



RAMLAH RAHMAN
NIM. 11.2200.014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

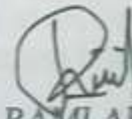
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RAMLAH RAHMAN
NIM : 11.2200.014
Tempat/Tgl. Lahir : Parengki, 13 Maret 1993
Program Studi : Muamalah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Maret 2016

Penulis



RAMLAH RAHMAN
NIM. 11.2200.014

ABSTRAK

RAMLAH RAHMAN., *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah.*

(dibimbing oleh Bapak Zainal Said dan Ibu Damirah)

Program pemerintah dalam subsektor perikanan diantaranya berusaha mengentaskan kemiskinan masyarakat pantai dan meningkatkan devisa non migas. Rumput laut merupakan salah satu komoditi perikanan yang berpotensi untuk mensukseskan program tersebut. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman modal daerah. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman modal daerah.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Intinya, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui observasi peneliti terhadap masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan masyarakat tentang Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa dinyatakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar menjadi lebih baik. Metode budidaya yang akan dilakukan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan rumput laut itu sendiri. Program pengembangan budidaya rumput laut ini selain untuk pembangunan daerah pesisir hal ini juga dapat meningkatkan anggaran dasar pemerintah daerah (APBD). Rumput laut *Gracilaria* dari Kabupaten Pinrang merupakan rumput laut terbaik di Asia ini merupakan peluang yang cukup baik bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan budidaya rumput laut sehingga kehidupan ekonomi masyarakat akan lebih meningkat. Faktor yang menghambat Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah diantaranya: Adanya faktor cuaca, Radiasi matahari mempengaruhi radiasi naik turunnya suhu air, dan Kadang menguntungkan maupun merugikan. Hal ini berarti bahwa kebijakan pemerintah belum mampu mengatasi distorsi harga rumput laut yang terjadi selama ini di pasar domestik. Permasalahan yang dihadapi dalam pemasaran rumput laut antara lain Masih adanya ikatan modal baik berupa sarana produksi maupun finansial kepada pembudidaya rumput laut oleh pedagang. Hal ini berpangkal pada masalah keterbatasan akses permodalan oleh pembudidaya rumput laut dari lembaga keuangan formal.

Key Word: Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Teori Analisis Kebijakan Daerah.....	8
2.2.2 Usaha Rumput Laut	11
2.2.3 Teori Produksi	15
2.2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 tentang	

Penanaman Modal Daerah.....	18
2.3 Tinjauan Konseptual.....	19
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.3 Fokus Penelitian	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
4.2 Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa	36
4.3 Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman modal daerah	43
4.4 Faktor saja yang menghambat Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah	64
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul table	Halaman
Table 4.3.1	Analisis Program Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut di Kabupaten Pinrang.	48
Tabel 4.4.1	Matriks Analisis SWOT Pengembangan Budidaya Rumput Laut Jenis <i>Kappaphycus alvarezii</i> di Kabupaten Pinrang.	50



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	23
Gambar 4.1	Gambar usaha rumput laut di Kecamatan Suppa	32
Gambar 4.2	Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	33
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Kecamatan Suppa	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Bukti Wawancara
Lampiran 5	Foto Lokasi Kecamatan Suppa di Kabupaten Pinrang
Lampiran 6	Riwayat Hidup Penulis



BAB I PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Sejak zaman orde baru hampir semua pemerintah daerah berupaya menarik investor sebanyak mungkin ke daerah mereka. Mereka membangun berbagai prasarana transportasi, merancang wilayah industri, menawarkan berbagai kemudahan izin, dan insentif pajak. Tawaran semacam ini diharapkan akan menarik para investor datang berinvestasi ke wilayah mereka. Upaya menarik investor bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada wilayah yang sudah melakukan berbagai kebijakan tapi tidak mampu menggaet minat investor. Namun di lain pihak ada wilayah tertentu mengalami krisis lahan karena banyaknya investor yang berminat.

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini selain karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.¹

Program pemerintah dalam subsektor perikanan diantaranya berusaha mengentaskan kemiskinan masyarakat pantai dan meningkatkan devisa non migas. Rumput laut merupakan salah satu komoditi perikanan yang berpotensi untuk mensukseskan program tersebut. Peningkatan produksi rumput laut diharapkan dapat

¹ Eprints, http://ums.ac.id/17435/2/BAB_1.pdf. Diakses Tanggal 17 Oktober 2015.

meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus devisa bagi Negara. Selain itu dapat melestarikan dan meningkatkan produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun sebagai komoditas ekspor. Budidaya rumput laut merupakan salah satu pilihan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut.

Rumput laut merupakan salah satu komoditas budidaya laut ekonomis penting yang dapat diandalkan, mudah dibudidayakan dan mempunyai prospek pasar yang baik serta dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat pantai teknologi dan hasil perikanan. Tilaar menjelaskan bahwa rumput laut memiliki nilai ekonomis yang penting karena penggunaannya yang sangat luas dalam industri kosmetik, makanan, obat-obatan maupun industri-industri lain yang memanfaatkan rumput laut sebagai salah satu bahan baku.²

Budidaya rumput laut yang pada umumnya dapat dilakukan oleh para petani/nelayan dalam pengembangannya memerlukan keterpaduan mulai dari penyediaan input produksi, budidaya sampai ke pemasaran hasil. Keterpaduan ini menuntut adanya kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam bentuk pola kemitraan usaha yang ideal antara petani atau nelayan dengan yang pada umumnya berada pada pihak produksi dengan pengusaha yang umumnya berada pada pihak yang menguasai pengolahan dan pemasaran.

Metode vertikultur adalah metode penanaman rumput laut secara tegak lurus atau tali gantung. Vertikultur merupakan metode penanaman rumput laut yang lebih efisien memanfaatkan lahan. Aslan menyatakan bahwa untuk mewujudkan target produksi rumput laut nasional metode baru diperlukan. Pemanfaatan perairan yang relatif dalam atau kolom air perlu dioptimalkan. Metode budidaya yang dapat

² Tilaar, *The Use of Seaweed For Cosmetic Industry Developmen In Indonesia*, Presented In 1st Indonesia Seaweed Forum 2008: Makasar –Sulawesi selatan. h. 10

dilakukan untuk memanfaatkan kolom air yaitu vertikultur. Namun metode vertikultur yang telah ada sebelumnya, menambahkan bahwa tidak mudah untuk dilakukan karena membutuhkan kantong jaring sehingga perlu penerapan metode vertikultur yang lebih mudah dan murah.³

Namun demikian metode ini belum banyak dikenal masyarakat karena metode ini belum banyak dilaporkan secara ilmiah atau melalui media publikasi lainnya, jika dibandingkan dengan metode budidaya rumput laut lainnya. Beberapa masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang telah melakukan pembudidayaan rumput laut di berbagai kedalaman dan berat bibit awal yang berbeda pula. Secara Topografi perairan Kecamatan Suppa memiliki dasar perairan berpasir, lumpur berpasir dan pasir berbatu, dimana pada dasar perairan tersebut ditumbuhi oleh beberapa ekosistem yaitu lamun, terumbu karang serta di daerah pesisir. Selain itu kondisi perairannya relatif tenang yang menjadikan perairan ini sangat menunjang bagi usaha perikanan khususnya untuk budidaya rumput laut. Usaha budidaya rumput laut di daerah ini masih belum dikelola secara optimal, sehingga produksi rumput laut masih rendah, sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan produksi rumput laut maka perlu menerapkan suatu teknologi baru dengan memanfaatkan kedalaman perairan untuk menanam rumput laut.

Usaha peningkatan produksi rumput laut yang dikembangkan melalui modifikasi metode budidaya semakin banyak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Suppa. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai hasil produksi yang maksimal. Ini tentu memerlukan berbagai faktor pendukung, diantaranya pemakaian jenis rumput

³Aslan L.M., *Budidaya Rumput Laut*, Penerbit Kanisius: Yogyakarta. h. 89

laut yang bermutu, lingkungan yang sesuai, metode budidaya yang tepat serta kesesuaian jumlah bibit yang di tanam dengan kedalaman perairan.

Dikalangan masyarakat, kata investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (direct investment) maupun investasi tidak langsung (portfolio investment), sedangkan kata penanaman modal lebih mempunyai onotasi kepada investasi langsung. Penanaman modal baik langsung atau tidak langsung memiliki unsur-unsur, adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya mempertahankan nilai modalnya.⁴

Suppa merupakan salah satu wilayah budidaya rumput laut. Suppa mempunyai luas perairan laut lebih kurang 95.000 km², dihitung berdasarkan panjang garis pantai dan batas 200 mil laut dari garis pantai. Luas lahan potensial untuk budidaya laut lebih kurang 1.551,75 Ha dan baru dimanfaatkan untuk usaha budidaya laut seluas 418,5 Ha atau 26,96 % dengan jenis komoditas yang sudah dikembangkan. Potensi budidaya rumput laut di suppa Kabupaten Pinrang.

Budidaya rumput laut di suppa mengalami perkembangan cukup pesat, terutama dilihat dari peningkatan produksi dan produktivitasnya. Peningkatan produksi ini antara lain karena adanya rangsangan berupa peluang ekspor ke berbagai negara, kecuali kondisi pasar yang baik. Permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan modal usaha untuk pengadaan sarana media budidaya dan bibit rumput laut merupakan masalah saat pembudidaya akan mengembangkan usahanya. Selain itu penyakit rumput laut yang selama ini dikenal ice-ice, belum diketahui secara pasti penyebabnya hal ini menyulitkan penanggulangannya dilapangan, pada daerah potensial yang belum berkembang.

⁴ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2006), h. 1

Bagi pemerintah diharapkan untuk dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam bentuk penyediaan modal dan penambahan modal, agar petani dapat dengan mudah mendapatkan dana, memperoleh bantuan dalam bentuk teknis, dan penyediaan informasi ke arah perbaikan taraf hidup petani rumput laut. Bagi pemerintah Kabupaten Pinrang khususnya Dinas Pertanian, hendaknya membantu untuk meningkatkan kualitas dari diversifikasi tanaman cabai dan bunga pacar air sehingga diversifikasi tanaman cabai dan bunga pacar air lebih baik dibandingkan sekarang, sehingga pendapatan para petani dapat meningkat. Bagi para petani di Kecamatan Suppa diharapkan dapat meningkatkan produktivitas budidaya rumput laut, dengan cara pemeliharaan yang baik untuk rumput laut serta melengkapi sarana dan prasarana yang dipakai dalam budidaya rumput laut sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan guna untuk kesejahteraan petani.

Berdasarkan dari latar belakang yang terurai di atas serta pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman modal daerah”

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa?
- 1.2.2. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman modal daerah?

- 1.2.3. Faktor apa yang menghambat Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa.
- 1.3.2. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman modal daerah.
- 1.3.3. Untuk mengetahui Faktor saja yang menghambat Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah.

1.4. Kegunaan Penelitian

- 1.4.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya dan pengetahuan tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut pada khususnya.
- 1.4.2. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu penambahan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya.
- 1.4.3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapat informasi tentang Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penulis menemukan penelitian yang berjudul “*Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Wonogiri*” oleh Wuryanto, Riyo dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2012. Dari kesimpulan penelitian tersebut maka dari Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Wonogiri, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan yang terdapat dari penelitian tersebut adalah dalam Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil di Muhammadiyah Surakarta ini adalah masih kurangnya peran serta pemerintah dari pemerintah daerah.

Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap usaha rumput laut di Kecamatan Suppa di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu usaha rumput laut bagaimana yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Suppa untuk memperoleh pekerjaan/ usaha yang diperlukan dan diinginkan di Kecamatan Suppa sehingga dapat menunjang pendapatan keluarga.

2.2. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

2.2.1 Teori Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah

Policy (kebijakan) secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, *polis* (negara/kota), dan *pur* (kota) dalam bahasa Sanskerta dan menjadi *politia* (negara) dalam bahasa Latin. Bahasa Inggris pertengahan mengadopsi kata dari bahasa Latin tersebut menjadi *policie* untuk menunjukkan pada masalah yang berhubungan dengan publik dan administrasi pemerintah.⁵

kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.⁶ Untuk pelaksanaan kebijakan perlu ada lembaga (organisasi) yang mewadahi dan menjalankannya. Biasanya kebijakan di buat dan dilaksanakan oleh negara atau lembaga-lembaga atau badan dalam negara. Negara harus dibedakan dari pemerintah.

Pemerintah adalah sekumpulan orang yang ditugasi untuk menjalankan kehidupan suatu negara, yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan. Negara

⁵ A Purwasito,., *Perspektif Kebijakan Publik dalam Otonomi Daerah. Political Laboratory For Supporting For Governance*, UNS: Surakarta. 2001. h. 7

⁶ Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Penerbit Media Pressindo: Yogyakarta. 2002. h. 19

adalah seluruh sistem institusi publik yang bertanggung jawab atas administrasi dan menjalankan serta menegakkan keputusan-keputusan politik dan kebijakan yang telah diambil. Dalam monitoring dan evaluasi maka diperlukan sebuah penganalisisan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Dunn Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum; termasuk penggunaan intuisi, pengungkapan pendapat, dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahnya ke dalam sejumlah komponen, tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai dari penelitian untuk menjelaskan, atau (sekedar) memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai dengan mengevaluasi suatu program yang lengkap. Beberapa analisis kebijakan bersifat informal, meliputi tidak lebih dari proses berpikir yang keras dan cermat, sementara lainnya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dan penghitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematis yang canggih. Analisis Kebijakan dilakukan dengan menciptakan, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan (yang relevan dengan kebijakan) dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan.

Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung sepanjang waktu. Dan terdapat sejumlah cara di mana penerapan analisis kebijakan dapat memperbaiki proses pembuatan kebijakan Analisis kebijakan ada untuk menyediakan metodologi yang sistematis untuk memecahkan masalah yang rumit, tujuan yang secara langsung berlawanan dengan pandangan bahwa pembuatan kebijakan menyangkut kalkulasi yang sepenuhnya rasional, melibatkan aktor-aktor rasional secara ekonomis, politis, dan organisasional, yang berusaha memaksimalkan

utilitas ekonomi, kekuasaan politik, dan efektivitas organisasi. Metodologi analisis kebijakan diambil dari dan memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin ilmu: ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat. Metodologi analisis kebijakan bertujuan menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Dalam hal ini pengetahuan menunjuk pada kepercayaan tentang sesuatu yang secara akal sehat dapat dibenarkan, yang berbeda dengan kepercayaan tentang kebenaran yang pasti, atau juga kebenaran dengan probabilitas statistik tertentu. Metode analisis kebijakan adalah prosedur umum untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan dalam berbagai konteks.⁷

Metodologi Analisis Kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah; yaitu definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi dan evaluasi. Dalam analisis kebijakan, prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-nama khusus, misalnya: Definisi (perumusan masalah) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah; Prediksi (peramalan) menghasilkan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan (sekarang); Preskripsi (Rekomendasi) menghasilkan informasi mengenai nilai kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah; Deskripsi (Pemantauan) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan; dan Evaluasi menghasilkan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.

⁷ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. 2003. h. 21.

2.2.2. Usaha Rumput Laut

Salah satu sektor yang dapat dikembangkan di perairan Indonesia adalah sektor perikanan. Sektor perikanan memegang peranan penting dari peradaban manusia zaman prasejarah sampai zaman modern. Menurut Hempel dan Pauly perikanan merupakan kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut. Dalam artian yang lebih luas, perikanan tidak saja diartikan aktivitas menangkap ikan (termasuk hewan invertebrata lainnya seperti *finfish* atau ikan bersirip) namun juga termasuk kegiatan mengumpulkan kerang-kerangan, rumput laut dan sumber daya hayati lainnya dalam suatu wilayah geografis tertentu.⁸

Salah satu sektor perikanan yang berkembang pesat di Indonesia yaitu rumput laut. Rumput laut atau alga laut (*sea weed*) merupakan salah satu komoditas perikanan yang telah dimanfaatkan sejak lama. Daerah penghasil rumput laut meliputi perairan pantai yang mempunyai paparan terumbu (*reef flats*), seperti Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, Seribu, Karimunjawa, Selat Sunda, pantai Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, pulau-pulau di Sulawesi dan Maluku.⁹ Perairan ini merupakan tempat tumbuh dari semua jenis rumput laut yang ada di Indonesia. Menurut Pratikto, perairan pantai merupakan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Pengembangan budidaya rumput laut di Indonesia dirintis sejak tahun 1980 dalam upaya mengubah kebiasaan penduduk pesisir dari pengambilan sumberdaya alam ke arah budidaya rumput laut yang ramah lingkungan.

⁸ Sulasri, *Definisi Perikanan*. <http://sulasri-perikanan.blogspot.com/> diakses tanggal 3 Januari 2016.

⁹ Ahmad Kadi, *Potensi Beberapa Rumput Laut Di Beberapa Perairan Pantai Indonesia*. *Oseana*, 2004, 25-36.

Kondisi seperti ini tampak pula di Kecamatan Suppa. Kecamatan Suppa merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pinrang yang terdiri dari tiga pulau yaitu Suppa. Secara umum kondisi topografi Kecamatan Suppa tergolong landai sampai berbukit, dimana untuk daerah pesisir sepanjang pantai bagian utara berupa lahan datar dengan kemiringan 0-3% dari ketinggian lahan 0-268 m di atas permukaan laut (dpl) dan semakin ke selatan kemiringan lerengnya semakin bergelombang (Peta Lereng Provinsi Bali Skala 1:25.000. Pengembangan budidaya rumput laut di Kecamatan Suppa dilihat dari kondisi perairan pantainya serta jenis pantai yang landai mendukung untuk dikembangkan budidaya rumput laut.¹⁰ Adanya pengembangan budidaya rumput laut ini diharapkan kedepannya akan semakin banyak masyarakat pesisir yang tertarik dalam usaha budidaya rumput laut sehingga dapat meningkatkan tingkat perekonomian mereka yang selama ini sangat rendah karena ketergantungan mereka terhadap sektor perikanan.

Kecamatan Suppa memiliki potensi serta produktivitas yang tinggi untuk pengembangan budidaya rumput laut, namun dalam kenyataannya masih terdapat permasalahan yaitu strategi pengembangan usaha rumput laut masih kurang terencana. Pengembangan usaha dominan dipengaruhi oleh faktor harga rumput laut kering, ketika harga rumput laut tinggi maka usaha budidaya berkembang cepat dan ketika harga rumput laut rendah usaha budidaya berjalan lambat sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan petani. Kegagalan budidaya rumput laut sering disebabkan adanya hama yang dapat merusak tanaman. Hama tanaman budidaya rumput laut umumnya merupakan organisme laut yang memakan tanaman. Secara

¹⁰ Arya, Kencana “*Budidaya Rumput Laut (Kappaphyus Alvarezii) dan Pengembangannya*”. <http://aryacorrec.blogspot.com/2012/02usaha-rumput-laut.html> diakses tanggal 26 Desember 2012.

alami, organisme tersebut hidup dengan rumput laut sebagai makanan utamanya atau sebagian masa hidupnya memakan rumput laut.

Produktivitas budidaya rumput laut yang rendah mengacu pada keterbatasan produksi yang dihasilkan yang berdampak pada pendapatan petani rumput laut. Menurut Kadi penurunan produksi alami maupun budidaya ini biasanya dipengaruhi kondisi panen yang tidak tepat waktu petik atau oleh pengaruh penyimpangan musim yang berakibat buruk terhadap pertumbuhan rumput laut sebagai akibat dari faktor hidrologi yang tidak sesuai.¹¹ Pertumbuhan rumput laut akan kerdil atau mati. Pertumbuhan dan kelangsungan hidup juga ditunjang oleh kestabilan substrat sebagai tempat tumbuh, yakni pengaruh aktivitas manusia sehari-hari di atas substrat "*reef flats*" di daerah terumbu karang yang dapat menimbulkan tekanan terhadap kehadiran dan keanekaragaman rumput laut.

Pengembangan budidaya rumput laut masih dilaksanakan sendiri-sendiri secara sektoral, sehingga hasil dari budidaya rumput laut sering dipasarkan secara langsung kepada pedagang pengepul dengan tingkat harga yang relatif rendah dibandingkan dengan penjualan yang dilakukan oleh petani secara langsung ke pasar. Di sisi lain petani selalu berusaha untuk meningkatkan hasil produksi rumput laut dengan harapan untuk menjual produksi rumput laut pada tingkat harga yang dapat memberikan keuntungan guna dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Saat ini petani rumput laut di Nusa Penida sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan budidaya rumput laut, termasuk pasar baru, karena selama ini petani sangat terpuruk oleh permainan pengepul yang selalu menekan harga pasar dibawah standar terutama pada tahun ajaran masuk sekolah dan bulan-

¹¹ Ahmad Kadi, *Potensi Beberapa Rumput Laut Di Beberapa Perairan Pantai Indonesia: Oseana*, 2004. h. 25-36.

bulan tertentu karena para pengepul tahu bahwa pada saat itu petani rumput laut sangat membutuhkan biaya untuk membiayai anak-anak mereka di sekolah. jadi para petani mau tidak mau harus menjual hasil rumput laut mereka walaupun harganya dibawah standar.

Untuk mengkaji permasalahan tersebut maka digunakan teori sebagai berikut:

2.2.2.1. Penjelasan mengenai budidaya rumput laut. Menurut Departemen Pertanian, budidaya merupakan kegiatan terencana untuk pemeliharaan sumberdaya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan budidaya adalah kegiatan atau upaya manusia dalam bentuk pemeliharaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dengan menggunakan modal, teknologi dan sumber daya lain guna diambil manfaatnya. Rumput laut atau *sea weed* secara ilmiah dikenal dengan istilah alga atau ganggang.

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaan di bumi. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan".

Dalam Islam hak memperoleh perlindungan terdapat pada Al-Quran (Q.S. Al-Balad/90: 12-17).¹²

¹²Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000). h. 217

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقْبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُ رَقَبَةً ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقْبَةُ ﴿١٨﴾ فَكُ رَقَبَةً ﴿١٩﴾ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿٢٠﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿٢١﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿٢٣﴾

Terjemahannya:

Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, Atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Dan dia (Tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.

Berdasarkan ayat al-qur'an di atas dapat di pahami bahwa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah. setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, seperti makan, minum, menyembelih hewan dan sebagainya. Allah ialah nama zat yang Maha suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluk-Nya, tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. Ar Rahman (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.

2.2.3. Teori Produksi

2.2.3.1. Pengertian Produksi

Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiners menjelaskan bahwa secara umum, istilah “produksi” diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang

mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama sekali berbeda, baik dalam pengertian *apa*, dan *dimana* atau *kapan* komoditi-komoditi itu dilokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi itu. Dengan demikian produksi tidak terbatas pada pembuatan saja, tapi juga penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengeceran, pengemasan kembali, upaya-upaya menyasati lembaga regulator atau mencari celah hukum demi memperoleh keringanan pajak atau keleluasaan bergerak dengan jasa para akuntan dan pengacara, dan sebagainya.

Istilah produksi berlaku untuk barang maupun jasa, karena istilah “komoditi” memang mengacu kepada barang dan jasa. Bahkan sebenarnya perbedaan antara barang dan jasa itu sendiri, dari sudut pandang ekonomi, sangat tipis. Keduanya sama-sama dihasilkan dengan mengerahkan modal dan tenaga kerja.¹³ *Produksi merupakan konsep arus*. Apa yang dimaksud dengan konsep arus (*flow concept*) disini adalah produksi merupakan kegiatan yang diukur sebagai *tingkat-tingkat output per unit periode/waktu*. Sedangkan outputnya sendiri senantiasa diasumsikan konstan kualitasnya. Jadi bila kita berbicara mengenai peningkatan produksi, itu berarti peningkatan tingkat output dengan mengasumsikan faktor-faktor lain yang sekiranya berpengaruh tidak berubah sama sekali (konstan). Pemakaian sumber daya dalam suatu proses produksi juga diukur sebagai arus. Modal dihitung sebagai sediaan jasa, katakanlah mesin, per jam; jadi bukan dihitung sebagai jumlah mesinnya secara fisik. Lahan atau faktor produksi tanah pun diukur sebagai jasa lahan sekian *acre* (0,4646 hektar) per tahun, bukan sebagai luas lahan sekian *acre*.

¹³ Roger Leroy Miller dan Roger E.Meiners, *Teori Mikroekonomi Intermediate*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 251-252.

2.2.3.2. Fungsi Produksi

Sadono Sukirno menjelaskan bahwa hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya dinamakan fungsi produksi. Faktor-faktor produksi, dapat dibedakan kepada empat golongan, yaitu tenaga kerja, tanah, modal dan keahlian keusahawanan. Di dalam teori ekonomi, di dalam menganalisis mengenai produksi, selalu dimisalkan bahwa tiga faktor produksi yang belakangan dinyatakan (tanah, modal dan keahlian keusahawanan) adalah tetap jumlahnya. Hanya tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya. Dengan demikian, di dalam menggambarkan hubungan di antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai, yang digambarkan adalah hubungan diantara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai.¹⁴

Situmorang, Alam menjelaskan bahwa kegiatan produksi dapat berlangsung jika tersedia faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi terdiri atas alam (natural resources), tenaga kerja (labor), modal (capital), dan keahlian (skill) atau sumber daya pengusaha (entrepreneurship). Faktor produksi alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli (utama), sedangkan modal dan tenaga kerja disebut faktor produksi turunan.¹⁵

2.2.3.2.1. Faktor Produksi Alam: Faktor produksi alam ialah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor

¹⁴ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Cet III (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 193.

¹⁵ Situmorang, Alam. *Ekonomi Jilid I*. (Jakarta: ESIS, 2008), h. 55-56.

produksi alam sering pula disebut faktor produksi asli. Faktor produksi alam terdiri atas tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang.

2.2.3.2.2. Faktor Produksi Tenaga Kerja: Faktor produksi tenaga kerja (labor) ialah faktor produksi insani secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Meskipun mesin-mesin telah banyak menggantikan manusia sebagai pelaksana proses produksi, namun keberadaan manusia mutlak diperlukan.

2.2.3.2.3. Faktor Produksi Modal: Faktor produksi modal adalah faktor penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Faktor produksi modal dapat berupa mesin-mesin, alat pengangkutan, sarana pengangkutan, atau bangunan.

2.2.3.2.4. Faktor Produksi Keahlian: Faktor produksi keahlian adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.

2.2.3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman modal Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penanaman modal daerah Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Bupati pinrang, Menimbang bahwa:

2.2.3.1. Penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja dan pengolahan potensi ekonomi Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

2.2.3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penyelenggaraan

Penanaman Modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/kota;

2.2.3.3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu adanya kepastian hukum, insentif dan atau kemudahan pelayanan dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal;

2.2.3.4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Penanaman Modal Daerah.¹⁶

2.3. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian judul secara harfiah yaitu:

2.3.1. Analisis

analisa atau analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan kata analisa atau analisis mendapat sorotan dari kalangan akademisis, terutama kalangan ahli bahasa.

Penggunaan yang seharusnya adalah kata analisis. hal ini dikarenakan kata analisis merupakan kata serapan dari bahasa asing (inggris) yaitu *analysis*. Dari akhiran *-isys* bila diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *-isis*. Jadi sudah seharusnya bagi kita untuk meluruskan penggunaan setiap bahasa agar tercipta

¹⁶Perda Kab. Pinrang No.11 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal Daerah

praktik kebahasaan yang baik dan benar demi tatanan bangsa Indonesia yang semakin baik.¹⁷

2.3.2. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.¹⁸ Secara konseptual perlu dipahami tentang posisi pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah: penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis.html>. diakses tanggal 27 Oktober 2015.

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah_di_Indonesia.html. diakses tanggal 27 Oktober 2015.

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

2.3.3. Usaha Rumput Laut

Rumput laut adalah anggota dari kelompok vegetasi yang di kenal sebagai alga (ganggang). Termasuk ke dalam *thallophyta* (tumbuhan sederhana), tidak berakar, tidak bercabang, dan berklorofil. Rumput laut bermacam-macam jenis dan ukurannya. Ada yang merupakan sel tunggal yang amat kecil dan ada pula yang bersel banyak.²¹ Rumput laut tumbuh di perairan dangkal dan di perairan dalam sampai kedalaman 30 meter. Namun, ada beberapa jenis rumput laut yang bisa hidup sampai 280 meter. Biasanya ganggang tumbuh melekat di dasar laut atau pada benda padat seperti batu atau karang. Mereka melekat dengan menggunakan suatu stuktur

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2).

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

²¹ Nugroho Aji, *Teknologi Pemanfaatan Rumput Laut*, Departement Kelautan Dan Perikanan: Proyek Riset Kelautan Dan Perikanan.

seperti akar yang fungsinya sebagai alat berpegangan, bukan untuk menyerap sari makanan seperti tumbuhan lain pada umumnya.²²

2.3.4. Penanaman modal

Penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan dengan keuangan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan.²³

2.3.5. Kerangka pikir

Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai contoh, prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan, dan rekomendasi akan melahirkan aksi kebijakan, dan pemantauan akan menghasilkan hasil-hasil kebijakan, serta evaluasi akan melahirkan kinerja kebijakan. Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut, yakni merumuskan masalah kebijakan, melakukan peramalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi kebijakan. Michael Howlet dan M. Ramesh menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

2.3.5.1. Penyusunan agenda (agenda seting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.

2.3.5.2. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.

²² Dewi Nurmayati, *Kehidupan Pertumbuhan Laut Kandung: PT. Remaja Rosdakarya*. 2006. h. 3

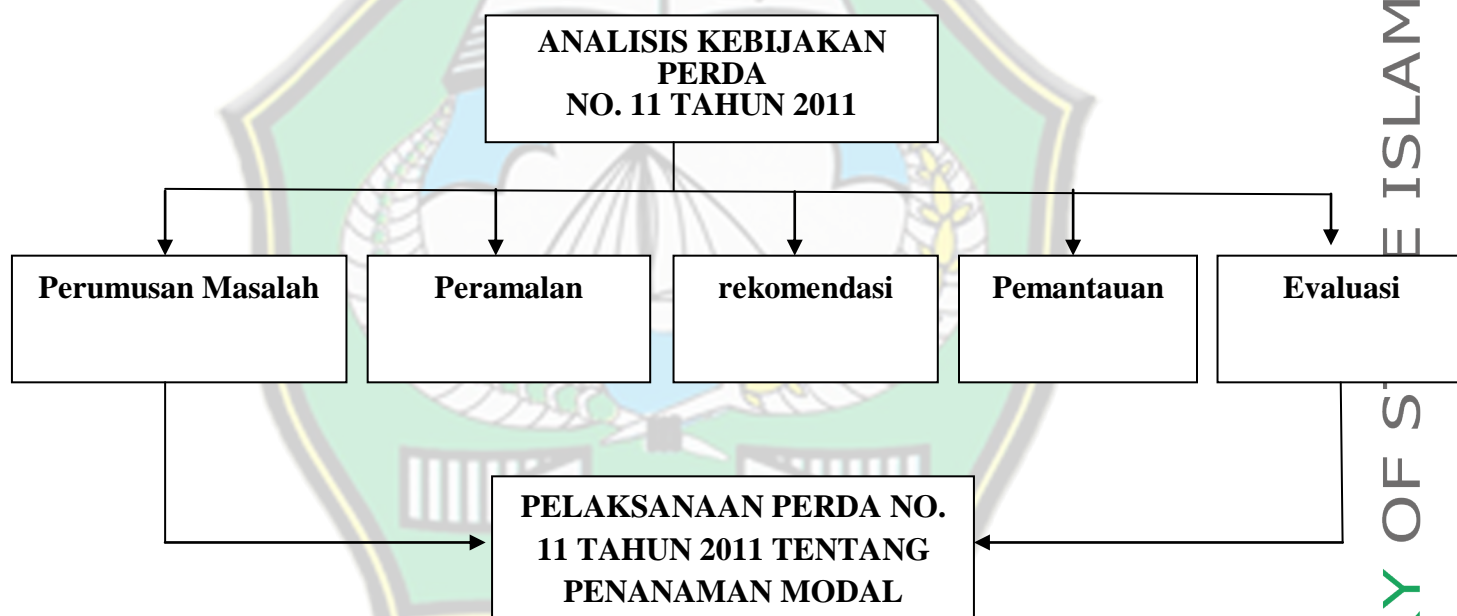
²³ Bpmppt, <http://jabarprov.go.id/index.php/submenu/683.com>. Diakses Tanggal 28 Desember 2015

2.3.5.3. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.

2.3.5.4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

2.3.5.5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

2.3. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.²⁴

3.1. Jenis penelitian

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.²⁵

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.115

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Pinrang di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan Waktu penelitian \pm 2 bulan.

3.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman modal daerah.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.²⁶ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan di catat untuk pertama kalinya.²⁷ Dengan kata lain, data lain di ambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa di perantara oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Rumput Laut Di

²⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)* (Jakarta, Rineka Cipta: 2006), h. 87

²⁷ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983),h.55.

Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman modal daerah. Data primer dalam hal ini di peroleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang di teliti.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi pada Dinas perikanan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁸ Adapun data sakunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan dokumentasi serta foto yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Pinrang.

3.5. Teknik pengumpulan data

Adapun tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam ini antara lain:

3.5.1 Teknik *field research*: Teknik field research dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat tekhnis, yakni sebagai berikut:

3.5.1.1. Wawancara (Interview)

Interview adalah merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

²⁸ Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h.12

3.5.1.2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan dilokasi.

3.5.1.3. Dokumentasi

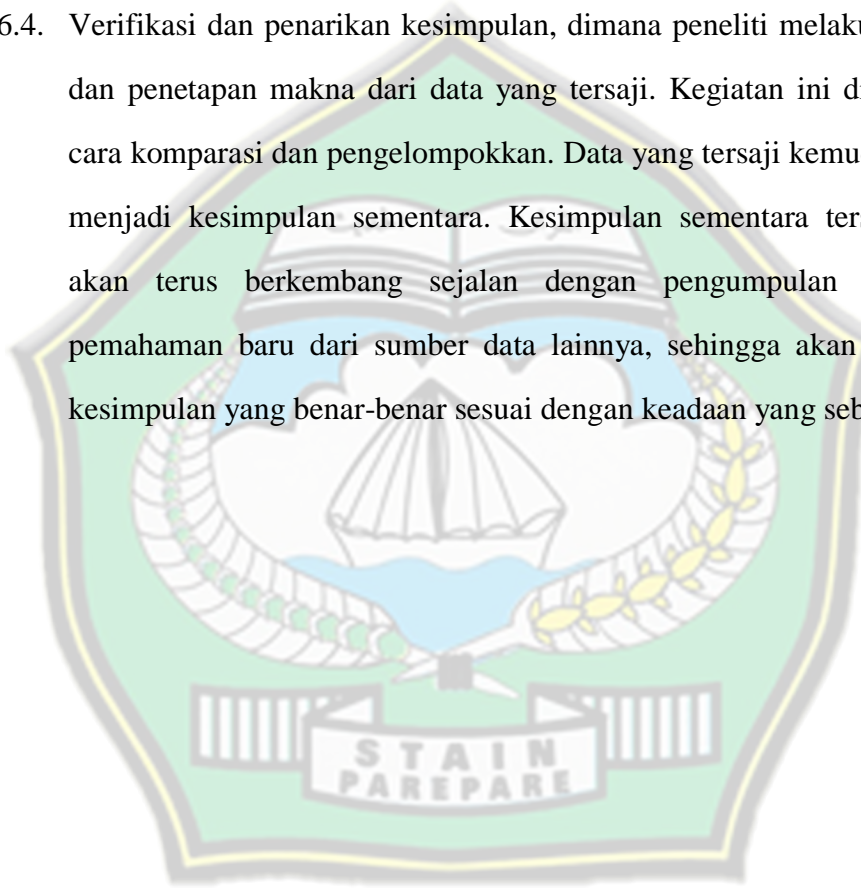
Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan proposal ini.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

- 3.6.1. Analisis Data adalah upaya yang dilakukan dengan cara yang dilakukan dengan cara menganalisis/memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.
- 3.6.2. Mereduksi data, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman modal daerah.

- 3.6.3. Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.
- 3.6.4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan, dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Asal Mula dan Sejarah Kabupaten Pinrang

Ada beberapa versi mengenai asal muasal pemberian nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi yang pertama menyebut bahwa Pinrang berasal dari Bahasa Bugis yaitu kata “*benrang*” yang berarti “air genangan” bisa juga berarti “rawa-rawa”. Hal ini disebabkan oleh karena pada awal pembukaan daerah Pinrang yang tepatnya saat ini di pusat kota kabupaten Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa. Versi kedua menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh karena suatu ketika Raja Sawitto yang bernama La Paleteang, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa berkat bantuan *To barani pole’ Kassa* disambut gembira oleh rakyatnya, namun mereka terheran-heran karena wajah sang raja berubah dan mereka berkata “*Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa*”, yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Maka setelah itu rakyat mulai menyebut daerah tersebut sebagai *Pinra* yang artinya berubah, dikemudian hari masyarakat setempat mengubah penyebutan tersebut menjadi Pinrang.

Tersebutlah suatu peristiwa di Sawitto pada waktu pemerintahan La Paleteang Raja IV, di Kerajaan Sawitto, Sulawesi. Pada waktu itu terjadi peperangan antara Sawitto dan Gowa. Perang ini terjadi karena Gowa sebagai kerajaan besar, berusaha untuk menguasai Sawitto yang kondisi dan potensinya menjanjikan setumpuk harapan. Berbagai upaya yang telah digunakan Gowa untuk menguasai Sawitto melalui agresi dan terjadilah perang antara Sawitto dan Gowa sekitar tahun

1540. Prajurit-prajurit Sawitto dengan gigih mengadakan perlawanan abdi kerajaan mati-matian mempertahankan dan membela bumi ini berkesudahan dengan kekalahan dipihak Sawitto sehingga raja La Paleteang dan isterinya dibawa ke Gowa sebagai tanda kemenangan Gowa atas Sawitto. Awan meliputi kesedihan rakyat atas kepergian sang raja yang arif dan bijaksana. Berbagai dilakukan membebaskan sang raja bersama permaisuri kerajaan Sawitto. Akhirnya dalam suatu musyawarah kerajaan terpilih dua Tobarani, yaitu Tolengo dan To Kipa untuk mengemban tugas membebaskan sang raja beserta permaisurinya. Kemudian berangkatlah kedua bersaudara tersebut ke Gowa yang berhasil membawa pulang raja La Paleteang beserta permaisurnya. Kedatangan raja bersama permaisuri disambut dengan luapan kegembiraan dan di elu-elukan sepanjang jalan menuju istana. Dibalik kegembiraan itu, mereka terharu melihat kondisi sang raja yang mengalami banyak perubahan seraya mengatakan “Pinra Kana Ni Tappa Na Datue Pole Ri Gowa”, yang artinya wajah raja mengalami perubahan sekembali dari Gowa. Kata-kata inilah senantiasa terlontar dari orang-orang yang menyertai sang raja. Ketika raja beristirahat sejenak sebelum tiba di istana bertitahlah sang raja kepada pengantarnya untuk menyebut tempat tersebut dengan nama PINRA.

Sumber lain ini mengatakan pemukiman kota Pinrang yang dahulunya rawa-rawa yang selalu tergenang air membuat masyarakat senantiasa berpindah-pindah mencari wilayah pemukiman yang bebas genangan air, berpindah-pindah atau berubah-ubah pemukiman dalam bahasa Bugis disebut “Pinra-Pinra Onroang”. Setelah masyarakat menemukan tempat pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi Nama: Pinra-Pinra. Dari kedua sejarah yang berbeda itu lahirlah istilah yang sama, yaitu “Pinra”, kemudian kata itu dalam perkembangannya dipengaruhi oleh

intonasi dan dialek bahasa Bugis sehingga menjadi Pinrang yang sekarang ini diabadikan menjadi nama dari Kabupaten Pinrang.

4.1.2 Letak Kecamatan Suppa

Kecamatan Suppa merupakan Kecamatan Suppa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pinrang yang berbatasan langsung dengan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia yang terdiri dari 2 kelurahan dan 8 Desa, yaitu :

4.1.2.1. Kelurahan Tellumpanua

4.1.2.1. Kelurahan Watang Suppa

4.1.2.3. Desa Lero

4.1.2.4. Desa Lotang Salo

4.1.2.5. Desa Maritengngae

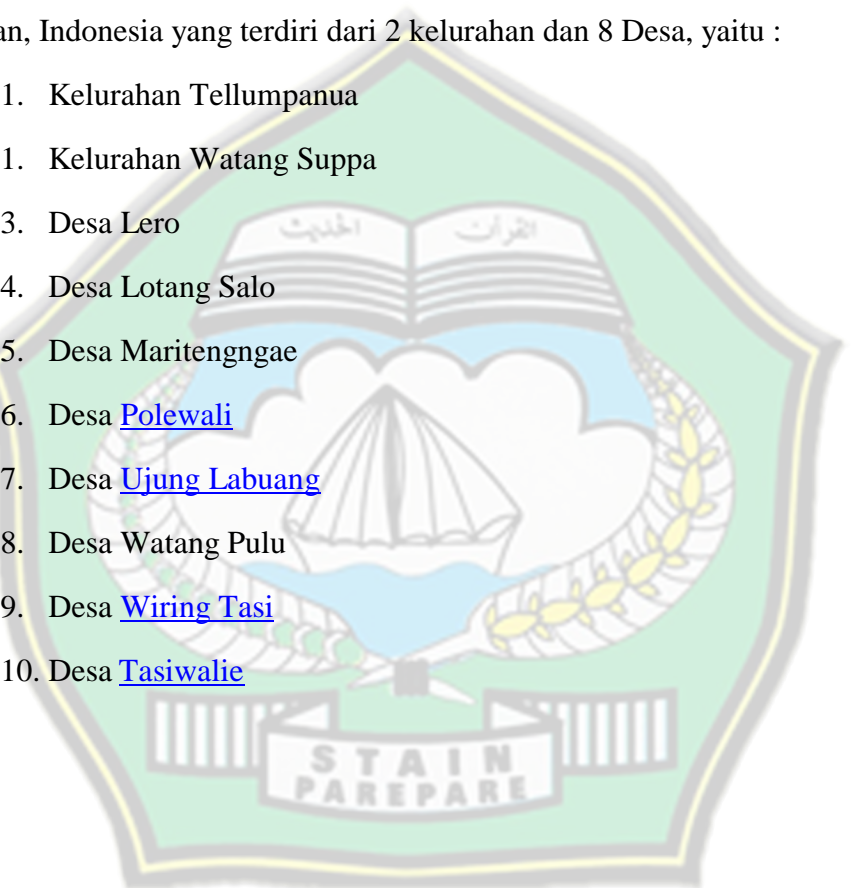
4.1.2.6. Desa [Polewali](#)

4.1.2.7. Desa [Ujung Labuang](#)

4.1.2.8. Desa Watang Pulu

4.1.2.9. Desa [Wiring Tasi](#)

4.1.2.10. Desa [Tasiwalie](#)



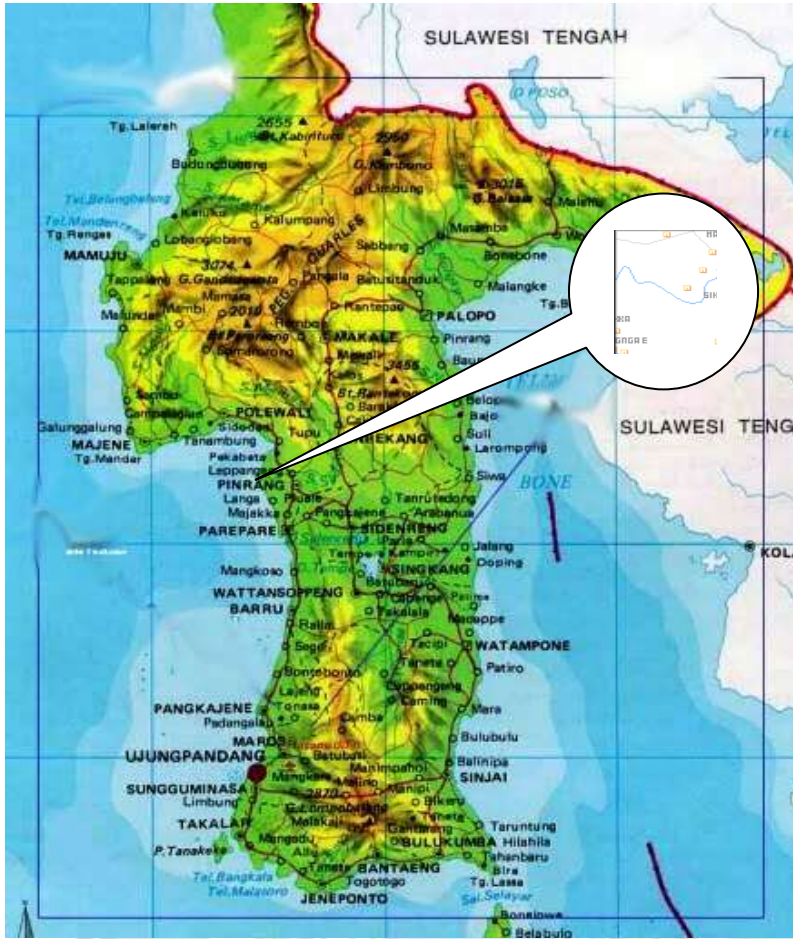
4.1.3. Profil lokasi penelitian di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

4.1.3.1. Letak usaha rumput laut di Kecamatan di Kabupaten Pinrang)



Gambar 1.1 Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa

Sebagai negara maritim dan kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia yang didalamnya terkandung kekayaan hayati sumberdaya rumput laut, yang apabila potensi tersebut dikelola dengan baik, seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat perikanan, khususnya nelayan sebagai pelaku utama dalam pembangunan perikanan. Namun apa yang terjadi adalah sebaliknya, masyarakat yang berada dalam jebakan lingkaran setan kemiskinan. Namun demikian, ketidakmampuan memanfaatkan sumberdaya ikan bukan satu-satunya yang harus dipersalahkan dalam permasalahan kemiskinan ini.



Sumber: Search Sulsel <https://maps.google.co.in> diakses 1 Desember 2015)²⁹



²⁹Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sumber: Search Sulsel <https://maps.google.co.in> diakses 1 Desember 2014)

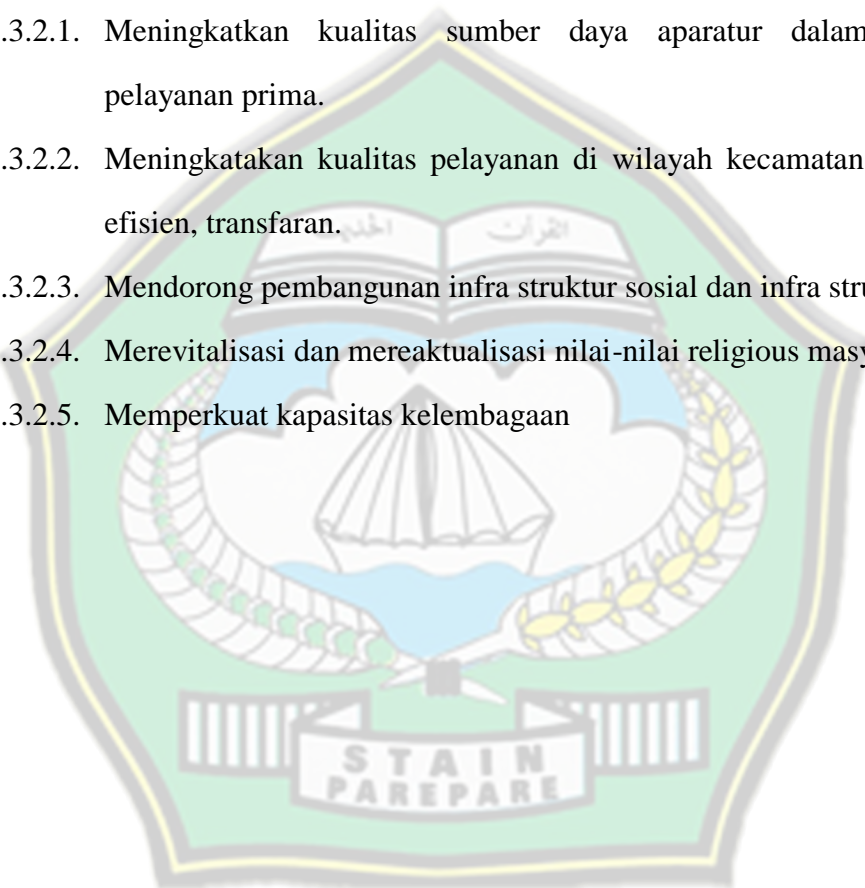
4.1.3.2. Visi dan misi

Visi

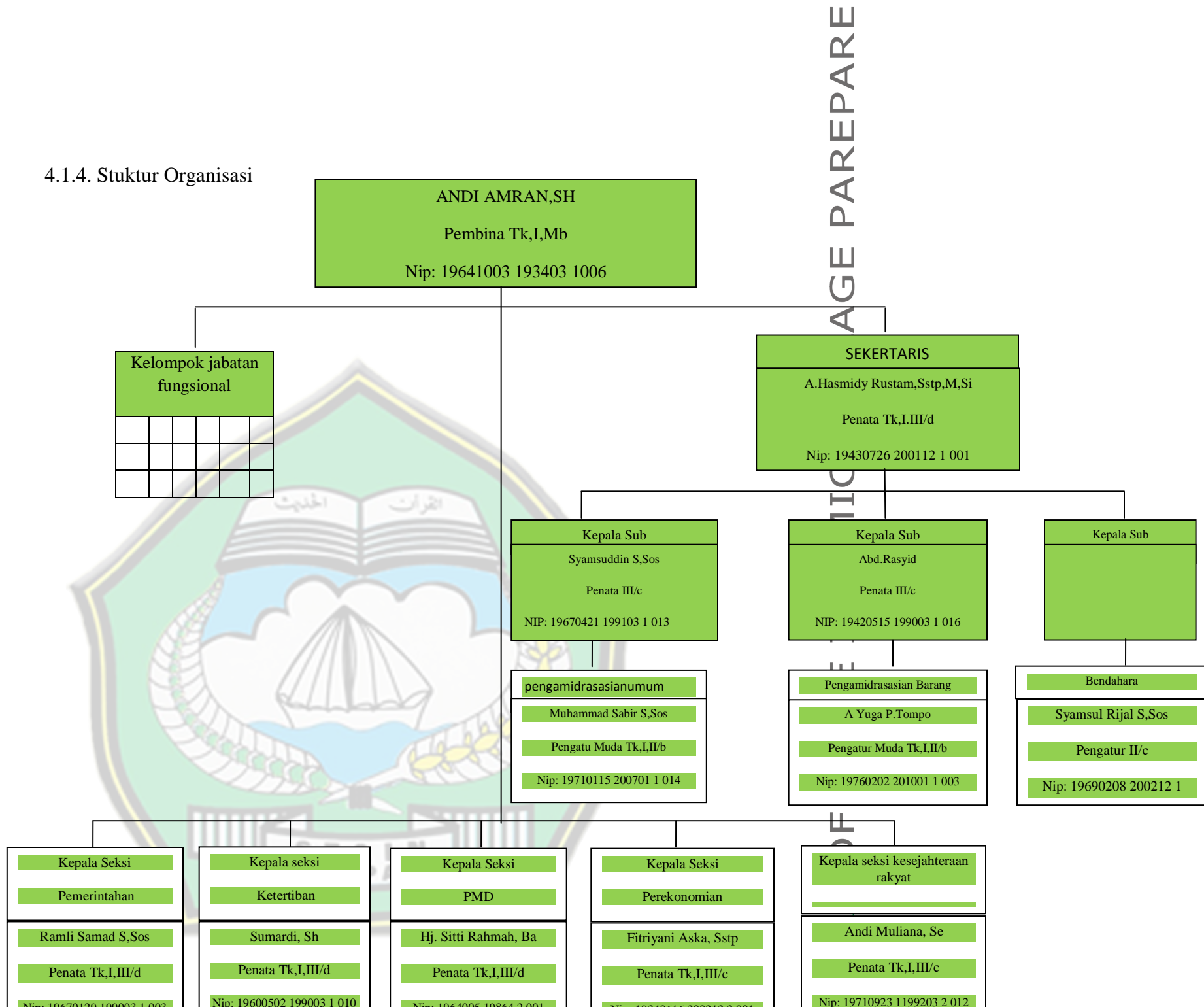
Mewujudkan masyarakat kecamatan suppa yang adil, sejahtera dan beriman melalui pelayanan prima Kantor Kecamatan Suppa

Misi

- 4.1.3.2.1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam mewujudkan pelayanan prima.
- 4.1.3.2.2. Meningkatkan kualitas pelayanan di wilayah kecamatan secara efektif, efisien, transparan.
- 4.1.3.2.3. Mendorong pembangunan infra struktur sosial dan infra struktur ekonomi.
- 4.1.3.2.4. Merevitalisasi dan mereaktualisasi nilai-nilai religious masyarakat.
- 4.1.3.2.5. Memperkuat kapasitas kelembagaan



4.1.4. Stuktur Organisasi



4.2 Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa

Pengetahuan masyarakat tentang Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa dinyatakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar menjadi lebih baik.³⁰ Metode budidaya yang akan dilakukan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan rumput laut itu sendiri. Sampai saat ini telah dikembangkan 5 metode budidaya rumput laut berdasarkan pada posisi tanaman terhadap dasar perairan. Metoda-metoda tersebut meliputi: metoda lepas dasar, metoda rakit apung. Metode *long line* dan metode jalur serta metode keranjang (kantong).

Metoda budidaya rumput laut yang telah direkomendasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan, meliputi: metoda lepas dasar, metoda apung (rakit), metode long line dan metode jalur. Namun, di dalam penerapan keempat macam metoda tersebut harus disesuaikan dengan kondisi perairan di mana lokasi budidaya rumput laut akan dilaksanakan. Uraian ketiga macam metoda tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1. Metode Lepas Dasar

Dilakukan pada dasar perairan yang berpasir atau berlumpur pasir untuk memudahkan penancapan patok/pancang, Namun hal ini akan sulit dilakukan bila dasar perairan terdiri dari batu karang.

Penanaman dengan metode ini dilakukan dengan cara merentangkan tali ris yang telah berisi ikatan tanaman pada tali ris utama dan posisi tanaman budidaya berada sekitar 30 cm di atas dasar perairan (perkiraan pada saat surut terendah masih tetap terendam air). Patok terbuat dari kayu yang berdiameter sekitar 5 cm sepanjang 1m dan runcing pada salah satu ujungnya.

³⁰ Suparman, Masyarakat, Parengki Kec. Suppa kab. Pinrang, wawancara pada tanggal 1 Maret 2016

Jarak antara patok untuk merentangkan tali ris sekitar 2,5 m. Setiap patok yang berjajar dihubungkan dengan tali ris polyethylen (PE) berdiameter 8 mm. Jarak antara tali rentang sekitar 20-25 cm.

Dengan demikian, untuk budidaya rumput laut dengan menggunakan metode lepas dasar berukuran (50 x 10) m², dibutuhkan bahan-bahan sebagai berikut:

1 Patok kayu (kayu gelam): panjang 1 m diameter 5 cm sebanyak 275 buah

4.2.1.1. Tali rentang: bahan PE berdiameter 4 mm sebanyak 870 m (10 kg)

4.2.1.2. Tali ris: bahan PE berdiameter 6 mm sebanyak 630 m (15 kg)

4.2.1.3. Tali rafia: sejumlah 20 gulung besar, dan

4.2.1.4. Bibit seberat 50 -100 gr per ikat sebanyak 500 – 1.000 kg.

Produksi rumput laut yang diperoleh dengan metode lepas dasar ukuran 500 m² untuk setiap musim tanam (mt) adalah sebesar 4.000 – 8000 kg basah atau 437,5 – 875 kg kering (dengan konversi sekitar 8:1) Sebaiknya bibit dipisahkan penanganannya dengan umur lebih kurang 25 hari.

4.2.2. Metode Rakit Apung

Metode rakit apung adalah cara membudidayakan rumput laut dengan menggunakan rakit yang terbuat dari bambu/kayu. Metode ini cocok diterapkan pada perairan berkarang dimana pergerakan airnya didominasi oleh ombak. Penanaman dilakukan dengan menggunakan rakit dari bambu/kayu. Ukuran setiap rakit sangat bervariasi tergantung pada ketersediaan material. Ukuran rakit dapat disesuaikan dengan kondisi perairan tetapi pada prinsipnya ukuran rakit yang dibuat tidak terlalu besar untuk mempermudah perawatan rumput laut yang ditanam.

Untuk menahan agar rakit tidak hanyut terbawa oleh arus, digunakan jangkar (patok) dengan tali PE yang berukuran 10 mm sebagai penahannya. Untuk

menghemat areal dan memudahkan pemeliharaan, beberapa rakit dapat digabung menjadi satu dan setiap rakit diberi jarak sekitar 1 meter. Bibit 50 -100 gr diikatkan di tali plastik berjarak 20-25 cm pada setiap titiknya.

Pertumbuhan tanaman yang menggunakan metode apung ini, umumnya lebih baik daripada metode lepas dasar, karena pergerakan air dan intensitas cahaya cukup memadai bagi pertumbuhan rumput laut. Metode apung memiliki keuntungan lain yaitu pemeliharaannya mudah dilakukan, terbebas tanaman dari gangguan bulu babi dan binatang laut lain, berkurangnya tanaman yang hilang karena lepasnya cabang-cabang, serta pengendapan pada tanaman lebih sedikit.

Kerugian dari metode ini adalah biaya lebih mahal dan waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan sarana budidayanya relatif lebih lama. Sedangkan bagi tanaman itu sendiri adalah tanaman terlalu dekat dengan permukaan air, sehingga tanaman sering muncul kepermukaan air, terutama pada saat laut kurang berombak. Munculnya tanaman kepermukaan air dalam waktu lama, dapat menyebabkan cabang-cabang tanaman menjadi pucat karena kehilangan pigmen dan akhirnya akan mati.

Agar pemeliharaan bisa lebih efektif dan efisien, maka pada umumnya 1 unit usaha terdiri dari 20 rakit dengan masing-masing rakit berukuran 5 m x 2,5 m. Satu rakit terdiri dari 24 tali dengan jarak antara tali masing-masing 20 cm. Untuk setiap tali dapat diikatkan 9 rumpun tanaman, dan jarak antara rumpun yang satu dengan yang lainnya adalah 25 cm. Jadi dalam satu rakit akan terdiri dari 300 rumpun dengan berat rata-rata per rumpun 50 -100 gram atau dibutuhkan bibit sebanyak 15 – 30 kg (Asumsi: bambu tidak digunakan untuk mengikat bibit).

Sarana dan peralatan yang diperlukan untuk 1 unit rakit apung usaha budidaya rumput laut yang terdiri dari 20 buah rakit berukuran 5 m x 2,5 m adalah sebagai berikut:

- 4.2.2.1. Bambu berdiameter 10-15 cm sebanyak 80 batang
- 4.2.2.2. Tali jangkar PE berdiameter 10 mm sebanyak 80 m atau 6 kg
- 4.2.2.3. Tali rentang PE berdiameter 4 mm sebanyak 2.800 m atau 33 kg (260 m/rakit);
- 4.2.2.4. Jangkar 4 buah (dari karung semen/ cor semen)
- 4.2.2.5. Tali DI 5 60 gulung (3 gulung/rakit)
- 4.2.2.6. Tempat penjemuran 1,2 x 100 m
- 4.2.2.7. Peralatan budidaya (keranjang, pisau, gergaji, dan parang)
- 4.2.2.8. Perahu jukung, sebanyak 1 unit, dan
- 4.2.2.9. Bibit sebanyak 300 – 600 kg (15 – 30 kg/rakit)

Hasil produksi yang akan diperoleh dari 1 unit yang terdiri dari 20 rakit ukuran 2,5 m x 5 m (asumsi hasil panen 8 kali berat awal) adalah sebesar 2.400 kg – 4.800 kg rumput laut basah per musim tanam(MT) atau 262,5 kg – 525 kg rumput laut kering (dengan konversi sekitar 8:1).

4.2.3. Metode Long Line

Metode *long line* adalah metode budidaya dengan menggunakan tali panjang yang dibentangkan. Metode budidaya ini banyak diminati oleh masyarakat karena alat dan bahan yang digunakan lebih tahan lama, dan mudah untuk di dapat.

Teknik budidaya rumput laut dengan metode ini adalah menggunakan tali sepanjang 50-100 meter yang pada kedua ujungnya diberi jangkar dan pelampung besar, setiap 25 meter diberi pelampung utama yang terbuat dari drum plastik atau

styrofoam. Pada setiap jarak 5 meter diberi pelampung berupa potongan *styrofoam*/karet sandal atau botol aqua bekas 500 ml.

Pada saat pemasangan tali utama harus diperhatikan arah arus pada posisi sejajar atau sedikit menyudut untuk menghindari terjadinya belitan tali satu dengan lainnya. Bibit rumput laut sebanyak 50-100 gram diikatkan pada sepanjang tali dengan jarak antar titik lebih kurang 25 Cm.

Jarak antara tali satu dalam satu blok 0,5 m dan jarak antar blok 1 m dengan mempertimbangkan kondisi arus dan gelombang setempat. Dalam satu blok terdapat 4 tali yang berfungsi untuk jalur sampan pengontrolan (jika dibutuhkan). Dengan demikian untuk satu hektar hamparan dapat dipasang 128 tali, di mana setiap tali dapat di tanam 500 titik atau diperoleh 64.000 titik per ha.

Apabila berat bibit awal yang di tanam antara 50-100 gram, maka jumlah bibit yang dibutuhkan sebesar antara 3.200 kg-6.400 kg per ha areal budidaya. Panen dilakukan setelah rumput laut mencapai umur lebih kurang 45 hari dengan hasil panen rumput laut basah sebesar antara 25.600 kg-51.200 kg (asumsi 1 rumpun bibit menjadi 8 kali lipat saat panen), kemudian di kurangi dengan persediaan benih untuk musim tanam berikutnya sebanyak antara 3.200 kg-6.400 kg. Maka hasil panen basah yang siap untuk dikeringkan sebesar antara 22.400 kg-44.800 kg atau diperoleh hasil panen rumput laut kering 2.800-5.600 kg (konversi dari basah menjadi kering 8:1).

4.2.4. Metode Jalur

Metode budidaya rumput laut di masing-masing daerah berkembang sesuai dengan kebiasaan dan kondisi lokasi perairan di wilayah tersebut. Dari ketiga metode budidaya yaitu lepas dasar, rakit apung dan longline telah berkembang di masyarakat beberapa metode baru, salah satunya adalah metoda jalur.

Metode ini merupakan kombinasi antara metode rakit dan metode long line. Kerangka metode ini terbuat dari bambu yang disusun sejajar. Pada kedua ujung setiap bambu dihubungkan dengan tali PE diameter 0,6 mm sehingga membentuk persegi panjang dengan ukuran 5 m x 7 m per petak. Satu unit terdiri dari 7-10 petak. Pada kedua ujung setiap unit diberi jangkar seberat 100 kg. Penanaman dimulai dengan mengikat bibit rumput laut ke tali jalur yang telah dilengkapi tali PE 0,2 cm sebagai pengikat bibit rumput laut. Setelah bibit diikat kemudian tali jalur tersebut dipasang pada kerangka yang telah tersedia dengan jarak tanam yang digunakan minimal 25 cm x 30 cm.

Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan rumput laut antara lain adalah:

4.2.4.1. Suhu

Suhu perairan mempengaruhi laju fotosintesis. Nilai suhu perairan yang optimal untuk laju fotosintesis berbeda pada setiap jenis. Secara prinsip suhu yang tinggi dapat menyebabkan protein mengalami denaturasi, serta dapat merusak enzim dan membran sel yang bersifat labil terhadap suhu yang tinggi. Pada suhu yang rendah, protein dan lemak membran dapat mengalami kerusakan sebagai akibat terbentuknya kristal di dalam sel. Terkait dengan itu, maka suhu sangat mempengaruhi beberapa hal yang terkait dengan kehidupan rumput laut, seperti kehilangan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, fotosintesis dan respirasi.

4.2.4.2. Arus

Arus merupakan gerakan mengalir suatu masa air yang dapat disebabkan oleh tiupan angin, perbedaan densitas air laut dan pasang surut yang bergelombang

panjang dari laut terbuka. Arus mempunyai peranan penting dalam penyebaran unsur hara di laut. Arus ini sangat berperan dalam perolehan makanan bagi alga laut karena arus dapat membawa nutrien yang dibutuhkannya. Salah satu syarat untuk menentukan lokasi *Eucheuma* sp adalah adanya arus dengan kecepatan 0,33 - 0,66 m/detik.

4.2.4.3. Salinitas

Di alam rumput laut *Eucheuma* sp tumbuh berkembang dengan baik pada salinitas yang tinggi. Penurunan salinitas akibat masuknya air tawar dari sungai dapat menyebabkan pertumbuhan rumput laut *Eucheuma* sp menurun. Tahir menyatakan bahwa salinitas yang cocok untuk pertumbuhan rumput laut berkisar 31-35 Ppt. Kisaran salinitas yang baik bagi pertumbuhan *Eucheuma* sp adalah 30-35 ppt. Kisaran salinitas yang baik untuk *Eucheuma* sp adalah 32 - 35 ppt.³¹

4.2.4.4. Ph

Keasaman atau derajat Ph merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan alga laut, sama halnya dengan faktor-faktor lainnya. PH maksimum untuk kehidupan organisme laut adalah 6,5 - 8,5.

4.2.5. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan

Proses penanganan pasca panen rumput laut masih cukup minim dimana proses penanganan pasca panennya hanya meliputi pencucian dengan air laut, penjemuran, pensortiran, penimbangan dan pengemasan akan tetapi apabila ada permintaan pasar yang meminta produk pasca panen rumput lautnya meliputi proses perendaman air tawar guna menghilangkan atau mengurangi kadar garam pada rumput laut maka petani disana juga akan melakukan proses penanganan pasca panen

³¹ Tahir, Masyarakat, Desa Sabamparu Kecamatan Suppa Kab. Pinrang pada tanggal 21 Januari 2016

meliputi pencucian (air laut) dan perendaman (air tawar), penjemuran tahap awal, penggaraman, penjemuran tahap ke dua dan setelah itu pengemasan. Akan tetapi cara yang kedua ini sangat jarang dilakukan oleh petani disana dengan pertimbangan mempermudah serta mempercepat proses penanganannya.

4.3. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman modal daerah

4.3.1. Perumusan masalah terhadap kebijakan

Melihat pentingnya peranan komoditas rumput laut dalam mendorong perekonomian khususnya di daerah tertinggal, diperlukan beberapa kebijakan, yaitu: Pemerintah daerah perlu menginisiasi pembangunan kebun bibit dan pabrik pengolahan rumput laut kering di sekitar produsen, paling tidak menjadi chip Perbaikan infrastruktur jalan di daerah tertinggal, dan Pelatihan kepada petani tentang budidaya rumput laut yang baik.

Undang-undang otonomi daerah berdasarkan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebabkan terjadinya perubahan yang fundamental terhadap elemen-elemen pemerintah daerah serta memerlukan penataan-penataan yang sistematis. Dengan demikian, kekuasaan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk sebagai wahana dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat setempat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan budidaya rumput laut di Indonesia dirintis sejak tahun 1980-an dalam upaya merubah kebiasaan penduduk pesisir dari pengambilan sumber daya alam ke arah budidaya rumput laut yang ramah lingkungan dan usaha budidaya ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pembudidaya juga dapat digunakan

untuk mempertahankan kelestarian lingkungan perairan pantai.³² Pengembangan budidaya rumput laut merupakan salah satu alternatif pemberdayaan masyarakat pesisir yang mempunyai keunggulan dalam hal:

4.3.1.1. Produk yang dihasilkan mempunyai kegunaan yang beragam.

4.3.1.2. Tersedianya lahan untuk budidaya yang cukup luas serta.

4.3.1.3. Mudahnya teknologi budidaya yang diperlukan.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ir H. Andi Budaya Hamid, mengemukakan bahwa: “Rumput laut pantas menjadi komoditas utama dalam program revitalisasi perikanan di samping udang dan tuna, karena beberapa keunggulannya, antara lain: peluang ekspor terbuka luas, harga relatif stabil, belum ada kuota perdagangan bagi rumput laut; teknologi pembudidayaannya sederhana, sehingga mudah dikuasai; siklus pembudidayaannya relatif singkat, sehingga cepat memberikan keuntungan; kebutuhan modal relatif kecil; merupakan komoditas yang tak tergantung, karena tidak ada produk sintetisnya; usaha pembudidayaan rumput laut tergolong usaha yang padat karya, sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Kegunaan rumput laut sangat luas, dan dekat sekali dengan kehidupan manusia”.³⁴

Uraian wawancara diatas dapat kita katakan bahwa rumput laut adalah salah satu komoditas yang sangat menjanjikan, dengan beberapa keunggulan seperti yang dipaparkan diatas kemudian rumput laut juga tergolong usaha yang menjanjikan hasil produksinya sangat besar untungnya sedangkan modal usahanya relatif murah.

³² Ditjenkan Budidaya, 2004

³³ Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001

³⁴ Ir H. Andi Budaya Hamid, kadis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pinrang

Program revitalisasi perikanan budidaya sasaran produksi rumput laut pada tahun 2015 adalah sebesar 50.763.00 ton. Oleh karenanya, strategi pencapaiannya ditempuh melalui pola pengembangan kawasan dengan komoditas *Euchema* sp. dan *Gracilaria* sp. Luas lahan pengembangan yang diperlukan sampai tahun 2015 adalah sekitar 1.475.24 ha, dimana seluas 1.238.99 ha untuk *Gracilaria* sp, dan 236.25 ha untuk *Euchema* sp. Pengembangan usaha alternatif masyarakat melalui usaha budidaya rumput laut dilatar belakangi oleh dukungan potensi sumberdaya alam. Bentangan garis pantai serta pulau-pulau dengan dasar perairan berkarang dan berpasir serta dukungan perairan yang terlindung dan relatif tenang sangat menunjang dalam usaha budidaya rumput laut. Dukungan sumber daya manusia yang sebagian besar adalah nelayan tradisional sangat berpeluang untuk mengembangkan jenis usaha alternatif ini. Dukungan pasar yang terus meningkat untuk komoditi ini juga menjadi latar belakang usaha alternatif ini dilaksanakan.

Pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Pinrang merupakan bagian integral dari pembangunan Kabupaten Pinrang secara umum, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan serta pengusaha perikanan secara optimal melalui pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

Strategi pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Pinrang pengelolaan perikanan budidaya rumput laut guna mendukung strategi pembangunan ini melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir Dukungan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pesisir ini khususnya masyarakat petani rumput laut yang ada di daerah/wilayah pesisir sesuai dengan program dan kegiatan yaitu:

4.3.1.1.1. Bidang Budidaya Perikanan.

Pada program dibidang budidaya perikanan ini berisikan program pengembangan budidaya rumput laut yaitu:

- 4.3.1.1.2. Program kelompok usaha dan modal budidaya rumput laut. Dalam bentuk Pengembangan Usaha Mandiri Bersama (PUMB).
- 4.3.1.1.3. Pengembangan Budidaya perikanan rumput laut.
- 4.3.1.1.4. Penyuluh Budidaya.

Program pengembangan budidaya rumput laut ini selain untuk pembangunan daerah pesisir hal ini juga dapat meningkatkan anggaran dasar pemerintah daerah (APBD). Rumput laut *Gracilaria* dari Kabupaten Pinrang merupakan rumput laut terbaik di Asia ini merupakan peluang yang cukup baik bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan budidaya rumput laut sehingga kehidupan ekonomi masyarakat akan lebih meningkat.

Hal ini juga dinyatakan dalam wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir H. Andi Budaya Hamid bahwa:

“Dinas Kelautan dan Perikanan sangat antusias dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat petani rumput laut ini. Pengembangan rumput laut ini telah dilaksanakan sejak tahun 2008 namun lebih ditingkatkan pada tahun 2012. Dalam pelaksanaan program ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus menjadi perhatian lebih bagi pemerintah daerah terkhususnya Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengembangan Budidaya rumput laut ini ada dua jenis yaitu *E.cottoni* dan *Gracilaria*. Bantuan-Bantuan dalam pelaksanaan program petani rumput laut diberikan dengan cara stimulan artinya para petani di rangsang agar lebih giat dalam pengembangan budidaya rumput laut ini”.³⁵

³⁵Ir H. Andi Budaya Hamid, kadis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pinrang

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah berusaha mungkin dalam pengembangan budidaya rumput laut ini melihat potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kecamatan Suppa yang Ada di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan yang dikatakan oleh mardan ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam usaha rumput mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani rumput laut ini seperti membawa angin segar bagi para petani rumput laut paling tidak ada sedikit bantuan yang di berikan dari pemerintah daerah untuk membantu kami (petani rumput laut) walaupun belum berpengaruh besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani rumput laut”.³⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani rumput laut ini sudah menyentuh masyarakat petani rumput laut, namun dalam pelaksanaannya tentunya masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat petani rumput laut.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani rumput laut dilakukan terlebih dahulu Musrenbang antara Dinas Kelautan dan Perikan dengan para petani rumput laut yang berada pada kelompok usaha bersama (KUB) disinilah di tampung segala aspirasi masyarakat petani rumput laut kemudian pihak KUB juga boleh mengajukan proposal bantuan untuk usaha rumput laut yang mereka miliki. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini pemerintah mendapatkan tiga sumber dana yang di peroleh dari pusat (PUMB) dalam bentuk modal, Provinsi

³⁶ Mardan, Masyarakat, Desa Parengki Kecamatan Suppa Kab. Pinrang pada tanggal 21 Januari 2016

(DPM) berupa bibit, dan Pemerintah Kota berupa sarana dan prasana berupa bibit, pupuk, perahu dan lain-lain.

Tabel 4.3.1. Analisis Program Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut di Kabupaten Pinrang.

NO	Indikator	Uraian	Analisis
1.	Pelaksanaan	Rumput Laut menjadi komoditas utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani rumput laut karena memiliki keuntungan yang besar dengan modal yang relatif kecil.	Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang berusaha untuk mengembangkan budidaya rumput laut dengan melihat beberapa keunggulan dari rumput laut serta keuntungan yang sangat menjanjikan.
2.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Sasaran pelaksanaan program pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani rumput laut yang ingin dicapai oleh Dinas Kealutan dan Perikanan adalah produk dan produktivitas. Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan aktualisasi	Pemerintah daerah berupaya untuk melakukan pencapaian dalam peningkatan produk dan produktivitas pengembangan budidaya rumput laut. Hal ini di implementasikan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

dari upaya pencapaian tujuan petani rumput laut yang dan sasaran dalam pembangunan dilaksanakan oleh Dinas kelautan dan perikanan sebagai Kelautan dan Perikanan peran sertanya terhadap sebagai peran sertanya pemberdayaan masyarakat petani dalam pemberdayaan rumput laut. masyarakat petani rumput laut.

3. Penembangan Budidaya Rumput Laut
- Pelaksanaan program petani rumput laut ini dilaksanakan dari tahun 2013 namun lebih di tingkatkan pada tahun 2016 ada dua jenis rumput laut yang di budidayakan yaitu Gracilaria dan E.cottoni. Rumput Laut Gracilaria ini dikembangbiakkan dalam tambak yang tersebar pada seluruh Kecamatan peisir Kabupaten Pinrang yaitu pada Kecamatan Suppa. Pelaksanaan program ini diberikan bantuan yang bersifat stimulant
- Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani rumput laut dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada daerah pesisir yang budidayanya terbagi atas dua jenis rumput laut yang berada pada tiap kecamatan. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani rumput laut ini diberikan bantuan yang bersifat stimulan.

Sumber Data: *Analisis Primer BPS Kabupaten Pinrang 2016.*

4.3.2 Peramalan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah

Secara umum yang dimaksud dengan pengertian peramalan (forecastin) yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. metode peramalan, yaitu suatu cara atau tekhnik dalam memperkirakan kejadian – kejadian pada masa yang akan datang. Kegunaan dari metode peramalan adalah membantu dalam mengadakan pendekatan analisa terhadap pola data pada masa yang lalu. Manfaat suatu peramalan bagi perusahaan:

4.3.2.1 Menambah kemampuan perusahaan untuk mengadakan pengawasan informasi kegiatan kegiatan tertentu atau memperbaiki proses pemberian laporan.

4.3.2.2 Memungkinkan timbulnya team work diantara pimpinan. Memungkinkan di buatnya jadwal – jadwal pembelian, produksi, budget penjualan dan budget alokasi pengeluaran sehingga di peroleh pedoman dasar bekerja yang relatif lebih tepat.

4.3.2.3 Jenis Peramalan Dilihat dari sifat penyusunannya, yaitu Peramalan subyektif dan Peramalan obyektif. Dilihat dari jangka waktunya, terdiri dari: Peramalan jangka panjang dan Peramalan jangka pendek. Tetapi jenis peramalan menurut Makridakis dan Wheelwright, membagi peramalan menjadi dua yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Adapun langkah – langkah untuk melakukan suatu peramalan sebagai berikut:

4.3.2.3.1. Pengumpulan Data

LUAS BUDIDAYA RUMPUT LAUT

BERDASARKAN POTENSI PENGELOLAAN TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	RTP Rumput Laut	RUMPUT LAUT (Ha)	KET
1	SUPPA	Telumpanua	91	70	Produktif
		Wt. Suppa	213	150	
		Maritengae	63	150	
		Tasiwalie		390	
		Lotang Salo		130	
		Wiringtasi	102	380	
		Polewalie/Wt.Pulu		-	
		Ujung Labuang	30	80	
		Lero	10	170	
			576	1520	
		2	LANRISANG	Lanrisang	
Waetueo				180	
Lerang				-	
Malongi-longi				-	
				200	
3	MATTIRO SOMPE	Langga		50	
		Pallameang		90	
		Patobong		80	
		Samaenre			

		Mattombong			
		Mat-tongang-tongang			
		Mattirotasi		50	
			10	270	
4	CEMPA				
		Tadang Palie		20	
		Sallipolo		10	
				30	
5	Duampanua				
		Paria			
		Bababinanga		20	
		Bittoeng			
		Barugae			
		Data	25	260	
		Maroneng	15	80	
			40	360	Produktif
6	LEMBANG				
		Sabang Paru	108	250	
		Binanga Karaeng	39	390	
			147	640	Produktif
	JUMLAH TOTAL		773	3020	

Jumlah kelompok rumput laut 64 (7-8 Basah dan 1 Kering)

DAFTAR: NAMA-NAMA KELOMPOK PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT

KABUPATEN PINRANG 2014

N O	KECAMATAN (Desa/ Kelurahan)	Jumlah Kelompok	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	KETUA KELOMPO K	K E T		
1	SUPPA Wiringtasi	1	CAHAYA MINRALO	10	CIDE			
		1	CAHAYA MINRALO II	10	IWAN			
		1	CAHAYA MINRALO III	10				
		1	CAHAYA ALLAKUAN G	10	ABD.RASYI D			
		1	BUNGA MEKAR	11	ANDI MELLE			
		1	BUNGA LAUT	11	P .SODDING			
		1	CAHAYA KAMARRAN G II	10				
		1	CAHAYA KAMARRAN G	10				
		1	LAUT MINRALO	10				
		1	MAMINASA E	10	ASDAR			
		Tasiwalie		1	MATTIRO TASI	11	MUNTA	
				1	MASIDIDIE	12	TAHIR	
				1	BAHARI LAUT	15	SYAFRI SAIN	

	1	7 WALI WALI	10	TAHIR
Maritenggae	1	SIPAKARIO	12	MUHLIS
	1	MASIDDI ADA	15	
	1	MANDIRI 1	20	DAMRI
	1	KARYA BAHARI III	10	RUSTAN
	1	BAHARI III	10	RUSTAN
Wt. Suppa	1	BINTANG LAUT	15	ANWAR SANUSI
	1	ILHAM	10	SYAMDUD DIN. S
	1	SATRIA LESTARI	15	SYAHRIR
	1	SATRIA LESTARI II	15	SYAHRIL
	1	WANUAE	10	Tajuddin
	1	MAMMINAS AE	10	SATTUNG
	1	MASSIDIE	12	SUDIRMAN
	1	MASSIDIE	10	M. ALI
	1	SINAR TERANG	11	TAHIR
	1	MUTIARA BIRU	12	ARIF
	1	SAHIRA	14	KASO
	1	MEKAR SARI	14	YUNUS
	1	MASSIDIE	10	MASYGURI
	1	KEJORA	10	ABD. ASIS

	1	KEJORA	10	JAMALUD DIN
	1	SIPAKAING A	10	AMRAN
	1	SIPAKAMAS E	10	SUGIARTO
	1	SIAMASEI	10	RAMLI. B
	1	SIPAKAMAS E	10	JAMAL
Tellumpanua	1	KARABALL O	19	MUH. WILO
	1	BINTANG LAUT	11	HAERUL
	1	MAKKARIT UTU	13	TAIYEB
	1	PULAU BILI- BILI	13	ALFIAH. S.Pi
	1	BILI BILI II	10	ABD. HAFID
	1	SIPAKAMAS E	10	MUHIDDIN
	1	BAHARI LAUT	15	SYAFRI SAIN
Ujung Labuang	1	MINA LESTARI	20	JAMAL
	1	Lumba- Lumaba	10	AGUS
Lero	1	MUTIARA	10	ASI

Jumlah KLP Suppa 27 KLP

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat terhadap peramalan usaha rumput laut di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

Menurut Suparman sangat bagus, karena bisa meningkatkan perekonomian Rakyat setempat dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat pengangguran.³⁷

Menurut Mardan: Sudah bagus, karena perekonomian masyarakat tidak seperti sekarang.³⁸

Menurut Tahir: Bagus, karena bisa menunjang perekonomian kita sendiri.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peramalan tentang usaha Rumput Laut Di desa Tasiwalie Kec.Suppa Kab.Pinrang Nomor 11 Tahun 2011, bahwa perekoanomian masayarakat tidak seperti yang sekarang, karena dapat membuka lapangan kerja.

4.3.3 Rekomendasi terhadap kebijakan

4.3.3.1 Rekomendasi dalam Analisis Kebijakan

Prosedur analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan analisis menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi di masa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat seluruhnya. Prosedur rekomendasi meliputi transformasi informasi mengenai aksi-aksi kebijakan yang akan menghasilkan keluaran yang bernilai.

Merekomendasikan suatu tindakan (aksi-aksi) kebijakan khusus diperlukan adanya informasi tentang konsekuensi-konsekuensi di masa depan setelah dilakukannya berbagai alternatif tindakan. Sementara itu, membuat rekomendasi kebijakan juga mengharuskan kita menentukan alternatif mana yang paling baik dan mengapa. Oleh karenanya prosedur analisis kebijakan dari rekomendasi terkait erat dengan persoalan etika dan moral.

4.3.3.2 Kriteria untuk Rekomendasi Kebijakan

Beberapa tipe pilihan rasional dapat diletakkan sebagai kriteria keputusan

³⁷ Suparman, Masyarakat, Desa Tasiwalie kec. Suppa kab Pinrang, wawancara pada tgl 26 Februari 2016

³⁸ Mardan, Masyarakat, Desa Tasiwalie Kec Suppa Kab Pinrang, wawancara pada tanggal 26 Februari 2016

³⁹ Tahir, Masyarakat, Desa Tasiwalie Kec.suppa Kab Pinrang, wawancara pada tanggal 26 Februari 2016

yang digunakan untuk menyarankan pemecahan masalah kebijakan. Dengan kriteria keputusan dimaksudkan secara eksplisit sebagai nilai-nilai yang digunakan melandasi rekomendasi untuk tindakan. Kriteria keputusan terdiri dari enam tipe utama, antara lain:

4.3.3.2.1 Efektifitas

Efektifitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

4.3.3.2.2 Kecukupan

Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menenknakan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4.3.3.2.3. Kriteria kesamaan

Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kriteria kesamaan erat hubungannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

4.3.3.2.4. Responsivitas

Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya, efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih

gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

4.3.3.2.5 Kelayakan

Kriteria kelayakan (appropriateness) biasanya bersifat terbuka, karena perdefinisi kriteria ini dimaksudkan untuk menjangkau keluar kriteria yang sudah ada. Oleh karenanya tidak ada dan tidak dapat dibuatkan definisi baku tentang kriteria kelayakan.

4.3.3.3. Pendekatan- pendekatan untuk rekomendasi

Terdapat dua pendekatan utama untuk rekomendasi dalam analisis kebijakan publik, yaitu analisis biaya-manfaat dan analisis biaya efektifitas.

4.3.3.3.1. Analisis biaya-manfaat adalah suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dan total keuntungan dalam bentuk uang. Analisis biaya-manfaat dapat digunakan untuk merekomendasikan tindakan kebijakan, dalam arti diaplikasikan ke depan, analisis ini dapat juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan.

4.3.3.3.2. Analisis biaya-efektivitas adalah suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis untuk membandingkan dan memberikan anjuran kebijakan dengan mengkuantifikasi total biaya dan akibat. Biaya diukur dalam bentuk uang sementara efektivitas diukur dalam satuan barang, pelayanan atau beberapa satuan nilai akibat lainnya. Analisis biaya-efektivitas digunakan untuk merekomendasikan berbagai alternatif kebijakan dan program-program dalam pemberantasan kejahatan,

pelatihan tenaga kerja, transportasi, kesehatan, pertahanan, dan berbagai bidang lainnya.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat tentang rekomendasi usaha rumput laut di wilayah Suppa adalah sebagai berikut:

Menurut Suparman: Lumayan bagus, karena bisa menyarankan, mengajak untuk bergabung bekerja sama di bidangnya masing-masing.⁴¹

Menurut Cide: Bagus, karena bisa menghasilkan penghasilan yang baik bagi para Masyarakat.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa rekomendasi Usaha Rumput Laut Di Desa Tasiwalie Kec. Suppa Kab. Pinrang Nomor 11 Tahun 2011, rata-rata masyarakat bisa bergabung dan bekerja sama dalam usaha rumput laut mereka masing.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pinrang Andi Budaya mengatakan, perusahaan nasional yang berkapasitas produksi 80 ribu ton itu telah menggelar syukuran sebagai tanda jadi pembangunan pengelolaan rumput laut di kabupaten Pinrang. Untuk wilayah Suppa, terdapat seribu hektar lokasi yang disiapkan untuk pembibitan rumput laut, setelah Pemerintah Pusat mengucurkan dana sebesar Rp1,2 Milyar untuk membiayai pembibitan rumput laut. Bibit rumput laut tersebut lanjut dia, akan dibudidayakan sepanjang pesisir kabupaten Pinrang yang memiliki panjang sekitar 93 kilometer dari kecamatan Lembang hingga di Ujung Lero Suppa. Produksi rumput laut di kabupaten Pinrang saat ini berkisar 450 ribu ton pertahun. Dengan adanya pabrik pengolahan rumput laut yang dibangun oleh PT BLG ini, maka produksi dapat dimaksimalkan hingga 10 ribu pertahun.

**LUAS AREAL DAN PRODUKSI RUMPUT LAUT DIRINCI TIAP
KECAMATAN DI KABUPATEN PINRANG, TAHUN 2014** *Area and
Production of Seaweed in Every Distritc in Pinrang 2014*

	Luas (Ha)	PRODUKSI (Ton)

⁴⁰ <http://ariefdotcom.blogspot.co.id/2012/06/rekomendasi-aksi-aksi-kebijakan.html> di akses pada tanggal 27 Juli 2016

⁴¹ Suparman, Masyarakat, Desa Tasiwalie Kec. Suppa Kab Pinrang, wawancara pada tgl 26 februari 2016

⁴² Cide, Masyarakat, Desa Tasiwalie Kec Suppa Kab Pinrang, wawancara pada tanggal 26 Februari 2016

KECAMATAN District	Area (Ha)			Production (Ton)		
	LAUT	TAMBAK	LAUT EUCHEM A COTTANI	TAMBAK GRASILLARIA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
01. SUPPA	610,00	-	3470,70	-	3470,70	
02. MATTIRO SOMPE	-	-	-	-	-	
03. LANRISAN G	-	-	-	-	-	
04. MATTIRO BULU	-	-	-	-	-	
05. WAT.SAWI TTO	-	-	-	-	-	
06. PALETEAN G	-	-	-	-	-	
07. TIROANG	-	-	-	-	-	
08. PATAMPA NUA	-	-	-	-	-	
09. CEMPA	-	40,00	-	50,90	50,90	
10. DUAMPAN UA	5,00	150,00	44,00	115,93	159,90	
11. BATULAPP A	-	-	-	-	-	
12. LEMBANG	10,00	-	67,60	-	67,60	
JUMLAH	2014	625,00	190,00	3582,30	166,83	3749,10
	2013	1000,00	600,00	3452,60	207,30	3659,90
	2012	1000,00	600,00	3483,20	407,00	3890,20
	2011	1000,00	600,00	3378,10	478,70	5359,70

<i>TOTAL</i>	2010	978,00	120,00	2135,50	323,00	2458,50
--------------	------	--------	--------	---------	--------	---------

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang

Source : *Fishery Service of Pinrang Regency*

4.3.3 Pemantauan terhadap kebijakan

4.3.4.1 Fungsi pemantauan (*monitoring*)

Menurut Wikipedia Indonesia (2012): *monitoring* (Bahasa Indonesia: pemantauan) adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (*awareness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2001): *monitoring* lebih menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan.

4.3.4.2 Tujuan pemantauan

4.3.4.3 Mengumpulkan data dan informasi

4.3.4.4 Memberikan masukan tentang kebutuhan

4.3.4.5 Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan

4.3.4.6 Memberikan informasi tentang metode yang tepat

4.3.4.7 Mendapatkan informasi kesulitan dan hambatan

4.3.4.8 Memberikan umpan balik bagi penilaian

4.3.4.9 Memberikan pernyataan berupa fakta dan nilai

4.3.4.2 Fungsi dari pemantauan

Menurut Dunn (1981):

- 4.3.4.2.1 Ketaatan (*compliance*)
- 4.3.4.2.2 Pemeriksaan (*auditing*)
- 4.3.4.2.3 Laporan (*accounting*)
- 4.3.4.2.4 Penjelasan (*explanation*)
- 4.3.4.2.5 Prinsip dari pemantauan
- 4.3.4.2.6 *Monitoring* harus dilakukan terus-menerus
- 4.3.4.2.7 *Monitoring* harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi
- 4.3.4.2.8 *Monitoring* harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan
- 4.3.4.2.9 *Monitoring* harus dapat memotifasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi
- 4.3.4.2.10 *Monitoring* harus berorientasi pada peraturan yang berlaku
- 4.3.4.2.11 *Monitoring* harus obyektif
- 4.3.4.2.12 *Monitoring* harus berorientasi pada tujuan program.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat tentang pemantauan usaha rumput laut di wilayah Suppa adalah sebagai berikut:

Menurut Iwan: Pemantauan yaitu Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan dalam memantau usaha rumput laut tersebut.⁴⁴

Menurut Andi Melle: pemantauan yaitu, Memberikan pernyataan berupa fakta dan nilai terhadap usaha rumput laut .⁴⁵

⁴³ <http://suhartama.blogspot.co.id/2013/03/fungsi-pemantauan>
Fungsi Pemantauan, Pengawasan, Penilaian di akses pada tanggal 27 Juli 2016

⁴⁴ Iwan, Masyarakat, Desa Tasiwalie Kec Suppa Kab Pinrang, wawancara pada tanggal 26 Februari 2016

⁴⁵ Andi Melle, Masyarakat, Desa Tasiwalie Kec Suppa Kab Pinrang, wawancara pada tanggal 26 Februari 2016

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemantauan Usaha Rumput Laut Di Desa Tasiwalie Kec.Suppa Kab.Pinrang Nomor 11 Tahun 2011, rata-rata masyarakat melaksanakan pemantauan dalam usaha rumput laut mereka, agar usaha mereka berjalan dengan baik.

4.3.5 Evaluasi terhadap kebijakan

4.3.5.1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Evaluation*. Secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dalam pengertian yang lain, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wrightstone, dkk (1956) yang mengemukakan bahwa pengertian evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan.

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Sebagai contoh evaluasi proyek, kriterianya adalah tujuan dan pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak mengapa terjadi demikian, dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh selanjutnya. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif. Sudijono (1996) mengemukakan bahwa pengertian

evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran.

4.3.5.2 Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan.

4.3.5.2.1 Menentukan apa yang akan dievaluasi.

Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah

4.3.5.2.2 Merancang (desain) kegiatan evaluasi.

4.3.5.2.2.1 Meneliti tempa usaha Rumput laut

4.3.5.2.2.2 Bibit yang mau di tanam

4.3.5.2.2.3 Tempat

4.3.5.2.3 Pengumpulan data.

4.3.5.2.3.1 luas budidaya rumput laut berdasarkan potensi pengelolaan tahun 2015

4.3.5.2.4 Daftar: nama-nama kelompok pembudidaya rumput laut kabupaten pinrang 2014

4.3.5.3 Pengolahan dan analisis data.

LUAS BUDIDAYA RUMPUT LAUT

BERDASARKAN POTENSI PENGELOLAAN TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	RTP Rumput Laut	RUMPUT LAUT (Ha)	KET
----	-----------	----------------	-----------------	------------------	-----

1 **SUPPA**

Telumpanua	91	70
Wt. Suppa	213	150
Maritengae	63	150
Tasiwalie		390
Lotang Salo		130
Wiringtasi	102	380
Polewalie/Wt.Pulu		-
Ujung Labuang	30	80
Lero	10	170
	576	1520

2 **LANRISANG**

Lanrisang		20
Waetuo		180
Lerang		-
Malongi-longi		-
		200

3 **MATTIRO SOMPE**

Langga		50
Pallameang		90
Patobong		80
Samaenre		
Mattombong		
Mat-tongang-tongang		
Mattirotasi		50

Produktif

		10	270	
4	CEMPA			
		Tadang Palie	20	
		SalIpolo	10	
			30	
5	Duampanua			
		Paria		
		Bababinanga	20	
		Bittoeng		
		Barugae		
		Data	25	260
		Maroneng	15	80
			40	360
6	LEMBANG			
		Sabang Paru	108	250
		Binanga Karaeng	39	390
			147	640
				Prod uktif
	JUMLAH TOTAL		773	3020
				Prod uktif

Jumlah kelompok rumput laut 64 (7-8 Basah dan 1 Kering)

4.3.5.2.5 Pelaporan hasil evaluasi.⁴⁶

⁴⁶ <http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-evaluasi-apa-itu-evaluasi.html#> diakses padatanggal 27 JULI 2016

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat tentang evaluasi dalam usaha rumput laut di wilayah Suppa adalah sebagai berikut:

Menurut Tahdia : semoga kedepannya berjalan sesuai rencana,sesuai dengan tujuan pembangunan.⁴⁷

Menurut Lisa, dalam mengevaluasi usaha mereka, menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan dalam usaha rumput laut.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengevaluasi usaha Rumput Laut Di Desa Tasiwalie Kec. Suppa Kab. Pinrang Nomor 11 Tahun 2011, rata-rata masyarakat melakukan evaluasi terhadap usaha rumput laut mereka, agar usaha mereka berjalan dengan baik dan tidak mengalami kegagalan dalam usahanya.

4.4 Faktor yang menghambat Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah

Kondisi dasar perairan yang sangat disukai rumput laut adalah berpasir, berlumpur atau campuran antara pasir dan lumpur. Banyak pula rumput laut yang dapat tumbuh dengan cara menempel pada batukarang yang telah mati, kerang maupun benda-benda yang mengandung kapur. Kondisi perairan yang cocok bagi pertumbuhan rumput laut adalah perairan yang jernih dengan ombak dan arus yang tidak terlalu besar.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan volume ekspor tersebut adalah produksi rumput laut yang sering mengalami kegagalan terutama

⁴⁷ Tahdia, Masyarakat, Desa Tasiwalie Kec Suppa Kab Pinrang,wawancara pada tanggal 26 Februari 2016

⁴⁸Lisa, Masyarakat, Desa Tasiwalie Kec Suppa Kab Pinrang,wawancara pada tanggal 26 Februari 2016

yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai aspek-aspek teknis seperti pemilihan lokasi, metode budidaya, manajemen produksi, pemilihan dan pengadaan bibit, musim serta tata letak Umumnya rumput laut banyak dijumpai di daerah yang mempunyai perairan agak dangkal (ketinggian air pada surut terendah ± 60 cm).

Tabel 4.4.1. Matriks Analisis SWOT Pengembangan Budidaya Rumput Laut Jenis *Kappaphycus alvarezii* di Kabupaten Pinrang:

<p>Faktor Eksternal Faktor Internal</p>	<p>Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi laut untuk budidaya rumput laut di Kabupaten Pinrang sangat luas 2. Dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi 3. Hasil produksi rumput laut dapat dirubah menjadi berbagai bentuk olahan 4. Permintaan pasar rumput laut semakin meningkat 5. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 	<p>Ancaman (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penyakit rumput laut ais-ais 2. Kekurangan bibit saat dibutuhkan 3. Produksi rumput laut dari daerah lain
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi untuk menjadikan usaha budidaya rumput laut sebagai mata 	<p>Strategi SO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan seluruh potensi laut yang dimiliki menjadi usaha yang 	<p>Strategi ST:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan budidaya rumput laut tepat waktu dan metode untuk menghindari

<p>pencaharian utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Lokasi budidaya jauh dari industri dan sumber pencemaran lainnya 3. Dalam mengembangkan rumput laut <i>Kappaphycus alvarezii</i> dapat dilakukan dengan berbagai metode budidaya 4. Pemasaran produk mudah 5. Sumber tenaga kerja mudah dan murah 6. Pengalaman berusaha petani rumput laut 	<p>mampu menghasilkan seperti budiaya rumput laut</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan pengolahan rumput laut dalam berbagai bentuk olahan yang mampu menghasilkan 3. Menerapkan metode budidaya rumput laut yang tepat 4. Mencari peluang pasar yang lebih besar 5. Memanfaatkan sumber tenaga kerja keluarga secara optimal 6. Optimalisasi usaha budidaya rumput laut sebagai sumber PAD 	<p>penyakit ais-ais</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan produksi dan kualitas produk rumput laut yang dihasilkan 3. Menjadikan rumput laut menjadi salah satu ikon Kabupaten Pinrang 4. Memanfaatkan sumber tenaga kerja dari dalam kabupaten secara optimal 5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya rumput laut di tingkat petani
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan dan keterampilan tentang budidaya rumput laut <i>Kappaphycus alvarezii</i> petani rumput laut terbatas pada kebiasaan yang sudah ada 2. Keterbatasan bibit rumput laut yang seragam dengan kualitas tinggi 3. Permodalan 	<p>Strategi WO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan potensi laut untuk budidaya secara optimal 2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pemerintah untuk mendapatkan bibit tahan penyakit 3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai sumber permodalan 4. Meningkatkan 	<p>Strategi WT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dukungan Pemerintah 2. Memperbanyak mengikuti penyuluhan dan/atau pelatihan budiaya rumput laut 3. Menambah kerjasama dengan semua pihak dalam menciptakan peluang pasar dan sumber permodalan 4. Memperbanyak diskusi kelompok

<p>4. Tingkat pendidikan petani rumput laut</p> <p>5. Kelompok yang terbentuk kurang bekerja secara maksimal</p>	<p>kinerja kelompok yang telah terbentuk</p>	<p>tentang pemecahan masalah dalam budidaya rumput laut.</p>
--	--	--

4.4.5 Memanfaatkan seluruh potensi laut yang dimiliki menjadi usaha yang mampu menghasilkan melalui budiaya rumput laut

Kabupaten Pinrang memiliki luas laut sebesar 17.100 km², dan jika potensi ini dimanfaatkan secara optimal untuk budidaya rumput laut, maka akan memberikan pendapatan yang tidak kecil bagi petani rumput laut. Potensi budidaya rumput laut di Kabupaten Pinrang mencapai 7.174 ton. Dari 7.174 ton potensi budidaya rumput laut di Kabupaten Pinrang, maka Kecamatan Suppa memiliki peran yang strategis dalam pengembangan budidaya rumput laut tersebut.

Wilayah Kecamatan Suppa merupakan salah satu wilayah yang banyak diusahakan budidaya rumput laut oleh masyarakatnya. Dalam pengembangan budidaya rumput laut ini terdapat beberapa faktor pembatas diantaranya keterlindungan perairan dan kondisi lingkungan. Keterlindungan perairan merupakan faktor pembatas utama untuk menentukan lokasi yang sesuai untuk budidaya rumput laut. Disamping itu, kondisi lingkungan perairan juga merupakan faktor pembatas untuk menentukan kesesuaian lahan rumput laut, dimana perairan dangkal dapat memberikan kerasteristik tersendiri terhadap arus dan gelombang.

4.4.6 Melakukan pengolahan rumput laut dalam berbagai bentuk olahan yang mampu menghasilkan

Sampai saat ini pengolahan rumput laut sudah dilakukan oleh petani rumput laut khususnya ibu-ibu dengan membuat berbagai hasil olahan rumput laut seperti lalapan rumput laut, manisan rumput laut, dodol rumput laut dan berbagai olahan lainnya. Namun pengolahan rumput laut yang dilakukan ini masih bersifat sederhana untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan belum dikelola dalam skala usaha agribisnis. Padahal jika usaha ini dikembangkan dapat memberikan pendapatan bagi petani rumput laut itu sendiri.

4.4.7 Menerapkan metode budidaya rumput laut yang tepat

Budidaya rumput laut merupakan salah satu usaha bidang perikanan yang mudah dilakukan dengan biaya dan modal yang tidak terlalu tinggi. Hasil wawancara dengan responden petani rumput laut menunjukkan bahwa 66,67% petani rumput laut menyatakan bahwa budidaya rumput laut jenis *Kappaphycus alvarezii* mudah dilakukan dan hanya 33,33% yang menyatakan bahwa budidaya rumput laut jenis ini membutuhkan keahlian tertentu.

Sampai saat ini metode budidaya rumput laut yang dilakukan oleh petani rumput laut di Kecamatan Suppa adalah metode *long line*, meskipun sudah pernah dicoba dengan menggunakan sistem rakit. Hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Suppa menunjukkan adanya perbedaan hasil panen/produk pada berbagai metode budidaya, dimana pada budidaya rumput laut yang dipelihara selama 40 hari memberikan hasil 279,75 kg dengan berat awal 55 kg, sedangkan dengan metode rakit dengan berat awal 35 kg hanya menghasilkan 124 kg.

4.4.8 Mencari peluang pasar yang lebih besar

Petani rumput laut di Kecamatan Suppa menjual hasil panennya dalam bentuk basah maupun kering. Penjualan rumput laut secara basah dilakukan jika petani

rumput laut yang lain ingin menjadikannya sebagai sumber bibit rumput laut pada usaha budidaya rumput lautnya dan/atau petani sangat memerlukan dana untuk kebutuhan hidupnya, sehingga pengeringan tidak dilakukan karena proses pengeringan memerlukan waktu yang relatif lama (2-3 hari), dan mereka sudah membutuhkan dana untuk kebutuhan hidup tersebut.

Namun demikian dalam hal pemasaran, petani rumput laut tidak mengalami kesulitan karena banyaknya pembeli rumput laut yang ada di daerah ini, baik yang berasal dari Kabupaten Pinrang maupun pembeli dari daerah lain. Dalam menjaga kestabilan harga rumput laut, dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan penyuluhan yang sering diselenggarakan oleh Politeknik Pertanian Kabupaten Pinrang, maka pada kegiatan tersebut dihadirkan pihak pembeli rumput laut agar terjadi kesepakatan dan kesepahaman yang saling menguntungkan antara petani rumput laut dan para pembeli rumput laut. Dalam menjamin kestabilan harga, maka perlu dilakukan yaitu memperkuat kekuatan kelompok yang telah dibentuk, kelompok dapat menampung sementara digudang yang dikelola secara bersama, ketua dan anggota kelompok lainnya terus menerus memantau harga dan kestabilan harga, jangan melakukan budidaya dibawa umur yang dianjurkan, misalnya minimal 40 hari sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Melakukan kegiatan panen, pasca panen, dan pengeringan sesuai standar yang dianjurkan.

4.4.9 Memanfaatkan sumber tenaga kerja secara optimal

Sumber tenaga kerja yang digunakan petani rumput laut di Kecamatan Suppa umumnya adalah dari keluarga sendiri, selebihnya dari luar keluarga. Tenaga kerja dari luar digunakan pada saat pengikatan bibit rumput laut, sedangkan pada saat budidaya umumnya dilakukan oleh tenaga kerja dari dalam keluarga petani.

4.4.10 Optimalisasi usaha budidaya rumput laut sebagai sumber PAD

Rumput laut dalam bentuk basah yang dihasilkan petani rumput laut di Kecamatan Suppa dijual ke sesama petani rumput laut, sedangkan rumput laut dalam bentuk kering dijual ke pedagang perantara yang ada di Kabupaten Pinrang. Selanjutnya, pedagang perantara menjual rumput lautnya ke eksportir yang ada di Kota Makassar. Lebih lanjut dikatakan bahwa perbedaan pola jalur pemasaran berpengaruh pada tingkat harga, pangsa keuntungan dan biaya serta margin pemasaran yang dilakukan oleh setiap pelaku pemasaran rumput laut.

4.4.11 Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pemerintah untuk mendapatkan bibit tahan penyakit

Sampai saat ini selain pemerintah Kabupaten Pinrang, petani rumput laut juga banyak mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama dalam hal teknis budidaya rumput laut. Beberapa tahun yang lalu petani rumput laut di daerah ini telah mendapatkan bantuan bibit rumput laut dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun demikian, kendala utama yang sering dialami oleh petani rumput laut di daerah ini adalah ketersediaan bibit pada saat dibutuhkan. Oleh sebab itu, beberapa waktu yang lalu pemerintah Provinsi Sulawesi selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan pernah mencanankan untuk menjadikan Kabupaten Pinrang sebagai sumber bibit.

Alasan utama petani rumput laut memilih salah satu sumber bibit tersebut karena sumber bibit tersebut diyakini memiliki kelebihan diantaranya lebih tahan terhadap penyakit serta mudah untuk memperoleh bibit rumput laut tersebut.

4.4.12 Meningkatkan kerjasama dengan berbagai sumber permodalan

Sampai saat ini sumber permodalan utama bagi petani rumput laut di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang adalah bersumber dari modal sendiri karena jika memperoleh sumber lain selain lembaga permodalan seperti pedagang pengumpul, maka dikhawatirkan mendapat berbagai kendala terutama terkait dengan pemasaran. Hal ini biasanya dilakukan petani rumput laut karena desakan kebutuhan uang sehingga mereka dua penjualan hasil panennya ke pedagang pengumpul sesuai persentase pinjaman terbesar.

4.4.13 Meningkatkan kinerja kelompok yang telah terbentuk

Sampai saat ini sudah terdapat beberapa kelompok petani rumput laut yang terbentuk di Kecamatan Suppa, namun kinerja kelompok tersebut masih perlu ditingkatkan produktivitasnya terutama dalam mendiskusikan cara budidaya, pemasaran serta hal-hal lain yang terkait dengan usaha budidaya rumput laut di kelompoknya.

4.4.13.2 Dukungan Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Pinrang sangat mendukung usaha budidaya rumput laut yang dilakukan petani rumput laut di Kecamatan Suppa, hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan berupa bibit serta bantuan teknis lainnya yang diberikan pemerintah kabupaten kepada petani rumput laut. Dengan adanya usaha budidaya rumput laut di daerah ini dapat meningkatkan dan menggairahkan perekonomian masyarakat dan hal ini juga sesuai dengan program pembangunan perikanan Kabupaten Pinrang.

Dengan demikian masih perlu peningkatan dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat petani rumput laut dalam mengembangkan usahanya. Jenis bantuan dan/atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten terhadap

usaha budidaya rumput laut di Kecamatan Suppa menunjukkan 53,33% petani rumput laut mendapatkan dukungan daam bentuk perizinan, 33,33% dalam bentuk motivasi dan 13,34% dalam bentuk lainnya.

4.4.13.3 Memperbanyak mengikuti penyuluhan dan/atau pelatihan budiaya rumput laut

Meskipun saat ini dalam memberikan penyuluhan kepada petani rumput laut di Kecamatan Suppa, namun kegiatan ini masih perlu dan terus dikembangkan, terutama dalam mengatasi berbagai permasalahan petani rumput laut. Hambatan lainnya, misalnya pemasaran meskipun juga terkadang terkendala dalam hal kestabilan harga tetapi bagi petani rumput laut di daerah ini, hal ini masih dapat diatasi tetapi penyakit rumput laut utamanya penyakit ais-ais dapat mematikan seluruh tanaman rumput laut yang dibudidayakan petani.

Selain masalah penyakit, permasalahan lain yang sering diterima oleh petani rumput laut di Kecamatan Suppa adalah lambatnya pertumbuhan rumput laut, terutama pada bulan-bulan tetentu seperti juli sampai agustus setiap tahun, sehingga pada saat demikian yang dilakukan oleh petani rumput laut adalah dengan berupaya untuk mempertahankan saja usaha budidaya rumput lautnya.

4.4.13.4 Menambah kerjasama dengan semua pihak dalam menciptakan peluang pasar dan sumber permodalan

Sumber permodalan utama bagi petani rumput laut di Kecamatan Suppa adalah modal sendiri ditambah dengan modal dari lembaga keuangan. Petani rumput laut umumnya menggunakan modal sendiri karena mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank, walaupun ada jumlah kredit yang ditawarkan lembaga perbankan sangat sedikit yang tidak cukup untuk digunakan

secara maksimal oleh petani rumput laut. Jika ingin budidaya rumput laut dapat berkembang dengan baik, maka petani rumput laut harus didekatkan dengan sumber permodalan lain seperti bank dan lembaga pembiayaan lain. Namun demikian, biasanya yang menjadi kendala utama masyarakat adalah lemahnya posisi tawar yang dimiliki.

Sumber permodalan petani rumput laut Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang adalah dengan meminjam modal dan kebutuhan hidup sehari-hari dari para pedagang pengumpul dan sepakat untuk dipotong nilai pembayaran rumput lautnya oleh pedagang pengumpul bersangkutan. Setidaknya kondisi tersebut merupakan perangkat pedagang pengumpul untuk mengikat para petani rumput laut untuk kepastian dalam memperoleh hasil panen rumput laut. Selanjutnya dikatakan bahwa, pembelian rumput laut didominasi oleh pedagang.

4.4.13.5 Memperbanyak diskusi kelompok tentang pemecahan masalah dalam budidaya rumput laut

Petani rumput laut yang ada di Kecamatan Suppa umumnya sudah membentuk kelompok dan hanya sedikit yang berusaha budidaya rumput laut tanpa kelompok. Umumnya petani rumput laut tersebut melakukan diskusi dengan sesama petani rumput laut secara informal pada waktu senggang, pada saat melakukan pengikatan rumput laut dan saat pengeringan rumput laut. Para petani rumput laut mendiskusikan pengalaman masing-masing tentang metode yang digunakan agar budidaya rumput laut yang dilakukan berhasil mencapai produksi maksimal. Hasil diskusi ini kemudian diterapkan oleh petani rumput lain sehingga mereka mencapai keberhasilan bersama baik dilakukan sesama dalam satu kelompok maupun kelompok lainnya.

Ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan nilai-nilai normatif ajaran Islam meliputi keseluruhan dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam berbicara amat jelas tentang larangan riba, hak kepemilikan harta dan kepemilikan barang-barang publik, persoalan pekerjaan, hak dan kewajiban majikan dan pekerja.

Sesuai dengan norma pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 278-279: Allah Berfirman.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ ۗ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁴⁹

Ekonomi Islam yang berjalan dalam asas kebersamaan dan keadilan itu tidak membolehkan salah satu pihak yang berkongsi menderita kerugian atau rugi sendirian, oleh karena itu menanggung resiko kerugian pada usaha bersama secara adil dan bijak mesti dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa terdzholimi dan tidak puas. Prinsip ini mengajak umat Islam yang berbisnis selalu senasib dan sepenenderitaan, jika untung mesti sama-sama untung dan jika rugi mesti sama-sama menanggungnya. Inilah suatu ajaran bisnis yang mengajarkan kita dalam kebersamaan, adil, transparan.

Dari beberapa hasil kumpulan pendapat masyarakat kecamatan suppa terhadap Faktor yang menghambat Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan

⁴⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.

Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah, diantaranya:

4.4.13.5.5 Adanya faktor cuaca.⁵⁰

4.4.13.5.6 Adanya faktor-faktor seperti:

4.4.13.5.6.1 Cuaca yang tidak memungkinkan.

4.4.13.5.6.2 Suhu perairan yang tidak stabil.

4.4.13.5.6.3 Radiasi matahari mempengaruhi radiasi naik turunnya suhu air.⁵¹

4.4.13.5.7 Kadang menguntungkan maupun merugikan.⁵²

Kegiatan diskusi yang dilakukan oleh petani rumput laut di Kecamatan Suppa dilakukan baik secara formal maupun informal. Dalam bentuk formal biasanya jika bertepatan dengan kegiatan penyuluhan serta informal adalah dengan melakukan diskusi tentang budidaya rumput laut disela-sela waktu luang pada saat istirahat atau saling mengunjungi ke rumah masing-masing untuk mendiskusikan permasalahan budidaya rumput laut yang sedang mereka jalankan.

Keterlibatan pemerintah selama ini belum mampu sepenuhnya mempengaruhi penyediaan input untuk pengembangan budidaya rumput laut dan harga output yang lebih menguntungkan. Saat ini, harga domestik rumput laut lebih rendah dari harga dunia. Hal ini berarti bahwa kebijakan pemerintah belum mampu mengatasi distorsi harga rumput laut yang terjadi selama ini di pasar domestik. Permasalahan yang dihadapi dalam pemasaran rumput laut antara lain Masih adanya ikatan modal baik

⁵⁰ Fahdia, Masyarakat, Desa Sabamparu Kecamatan Suppa Kab. Pinrang pada tanggal 21 Januari 2016

⁵¹ Suparman, Masyarakat, Desa Parengki Kecamatan Suppa Kab. Pinrang pada tanggal 21 Januari 2016

⁵² Lisa, Masyarakat, Desa Sabamparu Kecamatan Suppa Kab. Pinrang pada tanggal 21 Januari 2016

berupa sarana produksi maupun finansial kepada pembudidaya rumput laut oleh pedagang. Hal ini berpangkal pada masalah keterbatasan akses permodalan oleh pembudidaya rumput laut dari lembaga keuangan formal.

Permodalan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor kunci pengembangan rumput laut di daerah tertinggal, selain mampu meningkatkan posisi pembudidaya rumput laut, juga dapat meningkatkan kontinuitas produksi dan meningkatkan produktivitas. Beberapa saluran pemasaran rumput laut yang digunakan cukup panjang. Hal ini terjadi karena masalah akses menuju lokasi pemasaran yang biasanya berada di ibu kota provinsi (dekat pelabuhan), sehingga rumput laut dari pembudidaya harus melewati simpul pedagang-pedagang pengumpul baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.

4.4.14 Indikator yang menjadi penghambat kekuatan internal yang ada:

4.4.14.2 Potensi yang ada belum didukung dengan plotting kawasan pengembangan budidaya rumput laut sehingga Luas lahan budidaya yang termanfaatkan saat ini belum bias meng-*cover* keseluruhan potensi lahan yang tersedia.

4.4.14.3 Perairan Jepara relatif terbuka sehingga cukup riskan terhadap dampak gelombang musiman.

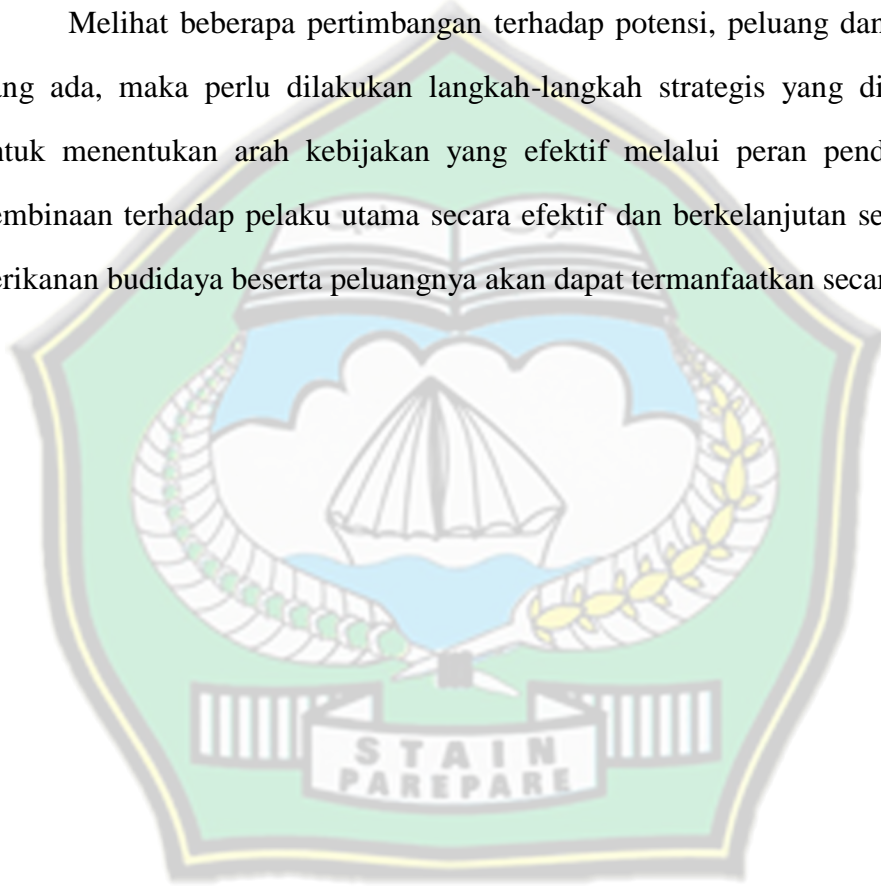
4.4.14.4 Jumlah sumber daya manusia tidak seluruhnya diimbangi dengan penguasaan teknologi budidaya rumput laut. Disamping itu, sebagian besar kelompok yang sudah terbentuk masih tergolong kategori pemula dan bahkan banyak pembudidaya ikan yang belum mempunyai wadah kelompok.

4.4.14.5 Animo masyarakat masih rendah, terutama untuk terjun melakukan kegiatan usaha budidaya laut.

- 4.4.14.6 Alih terap teknologi masih terkendala oleh aspek non-teknis terutama komitmen pelaku utama dalam melakukan kegiatan usaha budidaya.
- 4.4.14.7 Kurangnya jumlah pelaku Pembina sehingga mempengaruhi efektifitas pendampingan.
- 4.4.14.8 Kurangnya dukungan permodalan di tingkat pembudidaya.
- 4.4.14.9 Kelembagaan kelompok pembudidaya masih lemah karena sebagian besar merupakan pembudidaya pemula.
- 4.4.14.10 Peran pendampingan belum mengarah pada terbentuknya sebuah kelompok yang kuat secara kelembagaan maupun manajemen usaha yang *akuntable* dan *bankable*.
- 4.4.14.11 Kelembagaan UPP masih sebatas sebagai fasilitator belum berkembang mejadi sebuah lembaga usaha pokdakan yang kuat dan mandiri.
- 4.4.14.12 Indikator eksternal yang menjadi penghambat terhadap peluang yang ada:
- 4.4.14.13 Kebiasaan pasar yang menekankan adanya target quota produksi dan kontiyuitas permintaan, sehingga menjadi masalah tersendiri bagi pembudidaya skala kecil.
- 4.4.14.14 Dukungan dari pihak pemilik modal (lembaga keuangan mikro dan perbankan) masih sulit diakses terutama oleh pembudidaya kecil.
- 4.4.14.15 Konflik kepentingan terkait pemanfaatan zona perairan dimana sering terjadi konflik antara aktivitas budidaya dengan aktivitas nelayan tangkap.
- 4.4.14.16 Sistem monopoli pasar oleh beberapa pembeli/pemodal serta rantai distribusi pasar yang panjang, menyebabkan posisi tawar hasil produksi rendah.

Walaupun demikian, dari beberapa saluran tersebut terdapat saluran pemasaran yang dinilai paling efisien baik dari sisi teknis maupun ekonomis. Biasanya saluran pemasaran tersebut terbentuk karena sudah terjalin kerjasama yang cukup lama (langganan), kesadaran pembudidaya dan pedagang pengumpul desa terhadap potensi keuntungan yang bisa dioptimalkan, serta akses informasi.

Melihat beberapa pertimbangan terhadap potensi, peluang dan permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang dipandang perlu untuk menentukan arah kebijakan yang efektif melalui peran pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku utama secara efektif dan berkelanjutan sehingga potensi perikanan budidaya beserta peluangnya akan dapat dimanfaatkan secara optimal.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Sampai saat ini telah dikembangkan 5 metode budidaya rumput laut berdasarkan pada posisi tanaman terhadap dasar perairan. Metoda-metoda tersebut meliputi: metode lepas dasar, metode rakit apung. Metode *long line* dan metode jalur serta metode keranjang (kantung).
- 5.1.2. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini pemerintah mendapatkan tiga sumber data yang di peroleh dari pusat (PUMB) dalam bentuk modal, Provinsi (DPM) berupa bibit, dan Pemerintah Kota berupa sarana dan prasana berupa bibit, pupuk, perahu dan lain-lain.dengan adanya usaha rumput laut masyarakat sangat bersyukur, karena dalam usaha ini pelaksanaan usaha rumput laut mengalami peningkatan dan bisa menafkahi keluarganya.meskipun di dalam usaha ini masih banyak kendala di dalamnya tapi masyarakat bisa mengatasinya.
- 5.1.3. Permasalahan yang dihadapi dalam pemasaran rumput laut antara lain Masih adanya ikatan modal baik berupa sarana produksi maupun finansial kepada pembudidaya rumput laut oleh pedagang. Hal ini berpangkal pada masalah keterbatasan akses permodalan oleh pembudidaya rumput laut dari lembaga keuangan formal.

5.2. SARAN

Adapun saran penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 5.2.1. Perlunya pemahaman/ pemaparan terlebih dahulu agar Pengetahuan masyarakat tentang Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa dinyatakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar meningkat lebih baik lagi.
- 5.2.2. Dalam pelaksanaan program ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus menjadi perhatian lebih bagi pemerintah daerah terkhususnya Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 5.2.3. Perlunya perhatian pemerintah dalam beberapa pertimbangan terhadap potensi, peluang dan permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang dipandang perlu untuk menentukan arah kebijakan yang efektif melalui peran pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku utama secara efektif dan berkelanjutan sehingga potensi perikanan budidaya beserta peluangnya akan dapat dimanfaatkan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- A Purwasito, *Perspektif Kebijakan Publik dalam Otonomi Daerah. Political Laboratory For Supporting For Governance*, 2001, UNS: Surakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Aslan L.M, *Budidaya Rumput Laut*, Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.
- Dunn, William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Kadi, 2004, Ahmad, *Potensi Beberapa Rumput Laut Di Beberapa Perairan Pantai Indonesia. Oseana*
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset).
- Nugroho, Aji, *Teknologi Pemanfaatan Rumput Laut*, Departement Kelautan Dan Perikanan: Proyek Riset Kelautan Dan Perikanan.
- Nurmayati, Dewi, 2006, *Kehidupan Pertumbuhan Laut Kandung: PT. Remaja Rosdakarya*.
- Perda Kab. Pinrang No.11 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal Daerah
- Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiners, 2000, *Teori Mikroekonomi Intermediate*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sadono Sukirno, 2012, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Cet III (Jakarta: Rajawali Pers).
- Tilaar, 2008, *The Use of Seaweed For Cosmetic Industry Developmen In Indonesia*, Presented In 1st Indonesia Seaweed Forum: Makasar–Sulawesi selatan.
- Situmorang, Alam, 2008, *Ekonomi Jilid I*. (Jakarta: ESIS).
- Situmorang, Alam, 2008, *Ekonomi Jilid I*. (Jakarta: ESIS).

- Soekanto, Sujono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press).
- Subagyo, Joko, 2006, *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)* (Jakarta, Rineka Cipta).
- Supancana, Ida Bagus Rahmdi, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia).
- Tim Penyusun, 2013, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare).
- T.Gilarso, 2002, *Pengantar Ilmu Ekonomika*, (Bandung: Ganeca Excata).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Wahyu, Adji, *Ekonomi SMA untuk Kelas XI*. Bandung : Ganesha Excata (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Penerbit Media Pressindo: Yogyakarta.
- Arya, Kencana “*Budidaya Rumput Laut (Kappachyus Alvaressii) dan Pengembangannya*”. <http://aryacorrec.blogspot.com/2012/02usaha-rumput-laut.html> diakses tanggal 26 Desember 2012.
- Bpmppt, <http://jabarprov.go.id/index.php/submenu/683.com>. Diakses Tanggal 28 Desember 2015
- Eprints, http://ums.ac.id/17435/2/BAB_I.pdf. Diakses Tanggal 17 Oktober 2015.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis.html>. diakses tanggal 27 oktober 2015.
- Sulasri, *Definisi Perikanan*. <http://sulasri-perikanan.blogspot.com/> diakses tanggal 3 Januari 2016.





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Sarung Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email : email.stainparepare.ac.id

Nomor : St.19/PP.00.9/0205 /2016
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : RAMLAH RAHMAN
Tempat/Tgl. Lahir : PARENGKI , 13 Maret 1993
NIM : 11.2200.014
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : PARENGKI, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP USAHA RUMPUT LAUT DI KECAMATAN SUPPA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Pebruari** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

Parepare, 17 Pebruari 2016

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi, M.Ag.
NIP. 195412311991031032



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 993 050 - 090 014 - 093 013
PINRANG

Pinrang, 06 April 2016

Kepada

Nomor 070/66 / Kemas
Lamp -
Perihal Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth 1. Sekretaris DPRD Kab.Pinrang
2. Kepala Dinas Kelautan Perikanan
Kab.Pinrang
di-
Pinrang

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Nomor St.10/PP.00.00285/2016 tanggal 17 Februari 2016 Perihal Izin Metaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa

Nama	RAMLAH RAHMAN
Nim	11.2200.014
Jenis Kelamin	Perempuan
Pekerjaan/Prog Study	Mahasiswi / Syahri'ah dan Ekonomi Islam/Muamalah
Alamat	Parengki, Kec. Suppa, Kab.Pinrang
Telepon	085342927610

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP USAHA RUMPUT LAUT DI KECAMATAN SUPPA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAI" pelaksanaanya pada tanggal 25 Februari s/d 11 April 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui memberikan izin penelitian dengan ketentuan bahwa

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.

Demikian izin ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra


Dr. MANTONG M. Si
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip 19611231 19203 1 058

Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang.
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang.
3. Kepala Kapolres Pinrang di Pinrang.
4. Kepala Dinas DIKPORA Kab.Pinrang di Pinrang.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pinrang di Pinrang.
6. Kepala Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Pinrang di Pinrang.
7. Ketua STAIN Pare-Pare di Pare-Pare.
8. Camat Watang Sawitju di Pinrang.
9. Camat Suppa di Majennang.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui.
11. Penanggal.



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 983 050 - 983 014 - 983 213
PINRANG

Pinrang 24 Februari 2016
 Kepada

Nomor : 070/66 / Kemis
 Lamp :
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth **Camat Suppa**
 di
Suppa

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare Nomor : St.19/PP.009/0285/2016 tanggal 17 Februari 2016 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama	RAMLAH RAHMAN
Nim	11.2200.014
Jenis Kelamin	Perempuan
Pekerjaan/Prog Study	Mahasiswi / Muamalah
Alamat	PARENGKI, KEC. SUPPA
Telpon	085342927610

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP USAHA RUMPUT LAUT KECAMATAN SUPPA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH"** yang pelaksanaannya pada tanggal 25 Februari s/d 11 April 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan izin penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian izin rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.


AS. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan dan Kesra
SETDA
DR. MANTONG M.Si
 Pangkat Pembina Utama Muda
 Nip. 19611231 19203 1 058

Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang.
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang.
3. Kapolres Pinrang di Pinrang.
4. Kepala Dinas DISEPORA Kab.Pinrang.
5. Kepala Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang.
6. Kepala Kantor Kelemb.Politik dan Linnas Kab.Pinrang di Pinrang.
7. Ketua STAIN ParePare di Parepare.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.
9. Penutup.



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA

Alamat : Jalan Bau Masepe No. 4 Majennang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 51/KS/III/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI HASWIDY RUSTAM, SSTP, M.SI

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Suppa

Menerangkan bahwa :

Nama : RAMLAH RAHMAN

Tempat / Tanggal Lahir : Parengki, 13 Maret 1993

Alamat : Dusun Parengki, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Adalah benar Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare telah melakukan penelitian di Kecamatan Suppa dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP USAHA RUMPUT LAUT DI KECAMATAN SUPPA BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2011 TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH " yang dilaksanakan pada Tanggal 1 Februari s.d 29 Februari 2016.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majennang, 4 Maret 2016

Camat Suppa

Cam



ANDI HASWIDY RUSTAM, SSTP, M.SI

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19830726 200112 1 001

PEDOMAN WAWANCARA

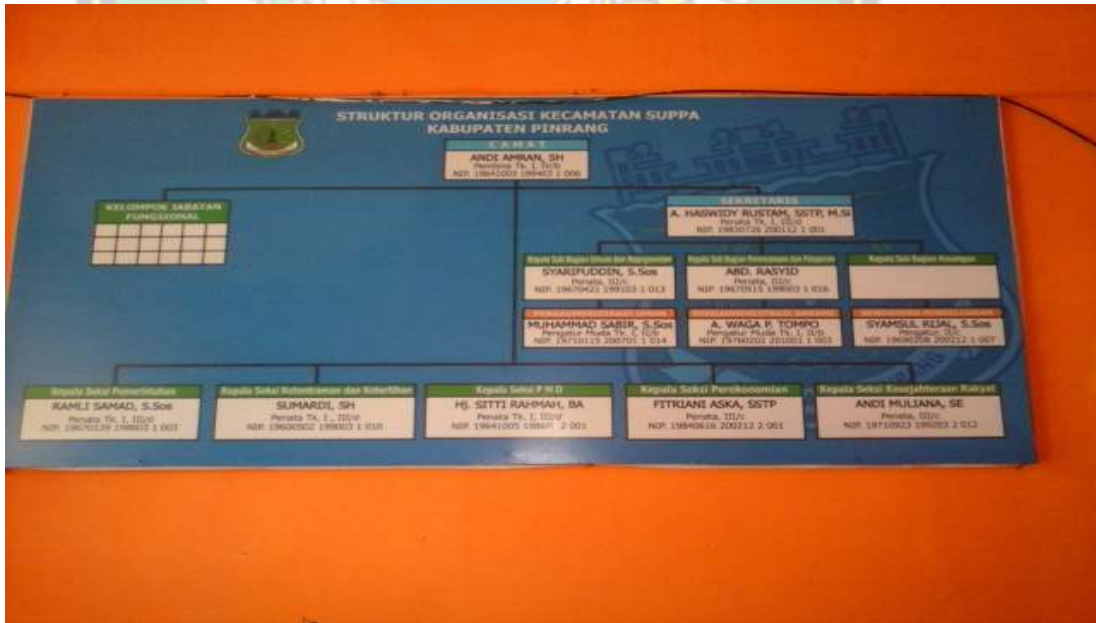
Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

- 1 Apakah anda sebagai masyarakat sudah mengetahui tentang Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa.
- 2 Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah sudah di terapkan?
- 3 Bagaimana Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa.
- 4 Faktor apa yang menghambat Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah.
- 5 Bagaimana bentuk perumusan masalah anda sebagai masyarakat terhadap analisis kebijakan Perda Nomor 11 Tahun 2011.
- 6 Bagaimana peramalan anda sebagai masyarakat terhadap analisis kebijakan Perda Nomor 11 Tahun 2011.
- 7 Bagaimana rekomendasi anda sebagai masyarakat terhadap analisis kebijakan Perda Nomor 11 Tahun 2011.
- 8 Bagaimana hasil evaluasi anda sebagai masyarakat terhadap analisis kebijakan Perda Nomor 11 Tahun 2011.
- 9 Bagaimana penerapan dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman modal daerah.

- 10 Bagaimana analisis anda sebagai masyarakat muslim Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah.









RIWAYAT HIDUP PENULISS



RAMLAH RAHMAN, lahir di Parengki. Pada tanggal 13 Maret 1993, merupakan anak ke-1 (satu) dari 2 bersaudara. Anak dari pasangan bapak Abd. Rahman dan ibu Napisa. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Parengki, Kelurahan Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2005 lulus Dari SD Negeri 202 Parengki, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan Pada tahun 2008 lulus dari SLTP Negeri 2 Parengki, dan melanjutkan di SMA 1 Suppa, dan lulus pada tahun 2011. Saat SD hingga SMU penulis aktif dalam organisasi Osis. Setelah itu kuliah di STAIN Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) pada tahun 2011. Dan mengikuti beberapa organisasi intra kampus dan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Syariah dan Ekonomi Islam. Pada semester awal tahun 2016 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul *“(Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah)”*.

Contact : rramlah96@yahoo.com